

MediaEkonomi

Terakreditasi No. 55/DIKTI/KEP/2005

Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Tingkat Propinsi di Indonesia: Implementasi Paradigma Pembangunan atas Data Makro Ekonomi Mulyanto	220
Pembalakan Liar di Indonesia: Penyebab dan Penanggulangannya Endah Saptutyningsih	243
Dimensi Geografis dan Kemiskinan Perdesaan Lukman Hakim Ahmad Zuber	260
Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah dan Nilai Kurs terhadap Inflasi di Indonesia Jakaria	281
Kinerja Ekspor Batik Indonesia, 1999-2003 Veronika	300

Media Ekonomi

Volume 14 Nomor 3, Desember, 2008

Terakreditasi No.55/DIKTI/KEP/200

Penasehat Editor Thoby Mutis - Rektor Univ. Trisakti
Farida Jasfar - Dekan Univ. Trisakti

Editor in Chief Sofyan Safri Harahap - Univ. Trisakti

Deputi Editor Nirdukita Ratnawati - Univ. Trisakti

Sekretaris Anis

Dewan Editor

Anna S.N. Dasril - Univ. Trisakti

Estv Setwaningrum - Univ. Trisakti

Sri Susilowati - Univ. Trisakti

Sri Yani Kusumastuti - Univ. Trisakti

Tiktik S. Pratomo - Univ. Trisakti

Tulus Tambunan - Univ. Trisakti

Catur Sugivanto - Univ. Gadjah Mada
Didik I. Rachbini - Univ. Mercubuana
Ennv Sri Hartati - INDEF
Ihon T. Ritonga - Univ. Sumatera Utara
Iossv Moeis - Univ. Indonesia
Molvanto - Univ. Sebelas Maret
Socia Prihawantoro - BPPT

Administrasi Anis

☺.

Alamat Redaksi

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (LPFE)

Gedung K, Lt. 2, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta 11440

Telp: (021) 566-3232 Ext.347, 5669178, Fax: (021) 566-9178

email: syafri@indo.net.id

nir_dukita@yahoo.com; nirdukita08@gmail.com

Media Ekonomi diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (LPFE) dan sepenuhnya dibiayai oleh Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. telah terakreditasi Dikti dengan nilai 1
Media ini diterbitkan tiga kali setahun.

Redaksi menerima tulisan, bidang ilmu ekonomi secara umum yang belum pernah diterbitkan oleh media lain dan tinjauan atas buku-buku ekonomi terbitan dalam dan luar negeri yang baru. Tulisan diutamakan merupakan hasil penelitian riset lapangan atau riset kepustakaan.
Proses pemuatan paper tergantung sepenuhnya pada "Blind editor" yang ditunjuk editor in chief sesuai dengan keahliannya.

EDITORIAL

KTT ASEM, Restruktur Sistem Keuangan dan Bretton Wood

Hasil kesepakatan yang diambil oleh KTT VII ASEM di Beijing tanggal 25 Oktober 2008, di China yang dihadiri 43 Pemimpin negara, paling tidak memberikan angin segar baru dan sedikit melegakan kita ditengah tengah kepanikan dunia terhadap krisis keuangan global yang dimulai dari Amerika dan menular ke seluruh dunia. Yang membuat kita lega adalah karena salah satu keputusannya adalah persetujuan pemimpin dunia khususnya Eropa dan Asia untuk melakukan restruktur sistem keuangan dunia. Dalam pernyataan Pemimpin Eropa Asia itu disebutkan: "Menyetujui melakukan perombakan komprehensif dan efektif terhadap sistem finansial dan moneter internasional". Usulan ini sebenarnya sudah pernah dikemukakan para pemimpin Eropa dan rencananya isu ini akan dibahas lebih mendalam di Washington pada pertemuan G-20 pada tanggal 15 November 2008 nanti. Dan itulah akar permasalahan krisis sekarang ini.

Sejauhmana restruktur sistem keuangan dunia dan bagaimana respons Amerika masih perlu ditunggu. Tanpa tekanan yang kuat dari situasi dunia dan negara Eropa, Asia dan lainnya saya sangat pesimis Amerika bersedia menjalankan saran KTT ASEM ini. Amerika selama ini diketahui selalu enggan merombak sistem finansialnya yang dikenal memiliki banyak kelemahan terutama dalam hal pengawasan karena filosofinya yang sudah mendarah daging yaitu konsep *laissez-faire* atau ekonomi pasar bebas yang memang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi dunia korporasinya namun sebagaimana selalu kita alami adalah terjadinya fluktuasi dan volatilitas keuangan yang merugikan semua pihak termasuk dunia lain. Pada saat terjadi "bullish" mereka berpesta pora dan sebaliknya pada saat terjadi krisis dan instabilitas keuangan maka pemerintah selalu membantu dan turut campur tangan dengan menggunakan dana Negara seperti yang terjadi sekarang ini. Menurut catatan jumlah dana publik yang disuntikkan dan disiapkan untuk mengatasi krisis ini tidak kurang US\$ 4 000 milyar (Rp 40.000 trilyun) dengan rincian: Amerika US\$ 1.200, Inggris US\$ 700,-, Jerman, US\$ 700,- Irlandia, US\$ 600,- Perancis US\$ 500,-, Rusia, US\$ 200,- Jepang, Korea, China US\$ 100,-. Dana ini dimaksudkan untuk menyelamatkan lembaga keuangan, perbankan, dan pasar modal. Dan tanda tanda positif setelah dana ini dikuncurkan belum terlihat dan para investorpun masih panik dan dampaknya ke sektor riil sudah mulai terasa dengan banyaknya perusahaan menghentikan operasi (bank, perusahaan investasi, otomotif, textile), meningkatkan pengangguran dan menurunnya harga harga komoditi pertambangan dan perkebunan. Apa sesungguhnya konsep perjanjian Bretton Wood tentang pengaturan sistem keuangan dunia? Mari kita revisit Bretton Wood Agreement itu.

Sisa dan akibat Perang Dunia I menghasilkan situasi ekonomi dunia pada era dekade 1920an dan dekade 1930an yang sangat sulit dan bermuara pada depresi ekonomi yang berat pada tahun 1929 dan seterusnya. Situasi itu setelah 75 tahun kemudian tampaknya akan terulang lagi melihat kondisi dan situasi yang kita alami sekarang ini. Tekanan situasi depresi ekonomi pada tahun 1929an itu memunculkan niat pemimpin dunia untuk merumuskan sistem moneter dan keuangan dunia yang lebih aman dan menjamin kesejahteraan manusia. Akhirnya para pemimpin dunia melakukan pertemuan yang sangat bersejarah di salah satu kota kecil Bretton Wood, New Hampshire, USA pada tanggal 22 Juli 1944.

Periode sebelum pertemuan Bretton Wood itu ditandai dengan situasi ekonomi yang sangat bebas. Pemikiran teori ekonomi liberal murni dengan motto *laissez-faire*, menguasai sistem keuangan Internasional saat itu dimana campur tangan negara dapat disebut diharamkan atau paling tidak diminimalkan. Dampak dari minimnya intervensi dan kontrol negara maka yang terjadi adalah membiarkan kurs Uang mengambang antara satu mata uang dengan mata uang yang lain sehingga munculnya sifat kebinatangan ekonomi dari para pelakunya yang akhirnya mengundang tindakan dan transaksi yang tidak *prudent*, *agresif*, *moral hazard*, kecurangan dan spekulasi yang merugikan pemilik mata uang dan sistem keuangan dunia.

Untuk meresponse situasi ini maka salah satu tokoh yang memberikan ide untuk mengatasi permasalahan ini adalah John Maynard Keynes yang menulis buku pada tahun 1936 yang berjudul "*General Theory of Employment, Interest, and Money*". Buku yang berani melawan arus yang mengoreksi pemikiran ekonomi bebas yang menguasai kebijakan ekonomi saat itu yang menurut David Felix adalah: kurs mengambang yang diterapkan periode itu telah mengundang arus modal yang abnormal yang tidak dikontrol yang merusak stabilisasi harga komoditi dan perdagangan internasional serta terjadinya spekulasi terhadap mata uang. Keadaan ini persis seperti yang kita alami saat ini. Bagaimana mengatasinya?

Keynes mengusulkan jalan keluar dengan menerapkan campur tangan pemerintah yang terbatas misalnya menetapkan kurs yang dapat diatur, melakukan pengawasan Modal (*capital control*) yang bisa menjamin kegiatan spekulasi dibentengi dari abnormal arus modal yang irrasional yang dapat menghancurkan stabilitas ekonomi yang meruntuhkan *welfare state*. Fungsi Uang jangan dijadikan sebagai alat para spekulan untuk meraih keuntungan abnormal yang dapat menghancurkan sistem ekonomi. Uang harus mengabdikan kepada manusia bukan sebaliknya manusia mengabdikan kepada uang demikian pendapat Robert Skidelsky seorang penganut Keynes.

Pemikiran Keynes inilah yang menginspirasi para pemimpin dunia sehingga melahirkan kesepakatan Bretton Wood. Tujuannya adalah untuk melindungi negara kesejahteraan dengan mendorong kesempatan kerja melalui mata uang dan liberalisasi perdagangan dan mencoba menyeimbangkan antara konsep *laissez-faire* vs regulasi. Mata uang dunia ditetapkan US Dollar, tetapi Dollar ini harus dikontrol dengan mempegangnya ke Emas dan semua mata uang lainnya mengkaitkannya ke US Dollar, Amerika harus menjamin bahwa Dollar setiap saat dapat ditukar dengan emas

dengan rate yang ditetapkan sat it US\$ 35 per ounce. Kesepakatan itu melahirkan IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menjamin stabilitas keuangan internasional. Kesepakatan inilah yang menjadi benteng inflasi dan permainan valas dan variasi bunga yang merusak itu. Inilah ide dari Keynes yang sesungguhnya. Apa hasilnya? Menurut catatan era disebut *golden age* (1944-1974), kesejahteraan masyarakat meningkat, volume perdagangan melonjak, gaji naik, stabilitas ekonomi internasional terjaga.

Perjanjian Bretton Wood yang bagus itu dibatalkan secara sepihak oleh Presiden Richard Nixon yang dibantu oleh Paul Volcker (FRB) dan George Shultz dan William Simon (Menteri Keuangan), pada tahun 1971. Nixon memutuskan hubungan antara US Dollar dengan Emas. Sistem keuangan dengan elemen modal, valuta asing dan bunga dibiarkan bebas, kembali pada *leisses faire* dan akhirnya spekulasi dan pencarian harta semauanya semakin subur dan dampaknya dapat kita rasakan. Krisis keuangan berbagai negara muncul: Black Monday, Wall Street 1989, Mexico 1994, Asia, 1997, Brazil, 1998, Rusia, 1998, Argentina 2000, Venezuela, 2002, Amerika, Eropa, Asia (Dunia), 2008 sekarang ini. Dari sisi sosial, kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin melebar, kerusakan lingkungan, *global warming*, perubahan iklim yang abnormal, dekadensi moral dan sebagainya menjadi pengalaman sehari-hari. Para spekulan sudah banyak mengantongi keuntungan sebelumnya dan mereka berteriak dengan kerugian sekarang dan meminta bantuan dana publik yang dibantu elite politik yang berkuasa. Itulah kezaliman dan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat yang lemah ini.

Suara Eropa dan Suara KTT ASEM kembali ke Bretton Wood merupakan angin segar yang saya yakin akan dimentahkan oleh Amerika pada tanggal 15 November yang akan datang. Salah satu suara yang sudah muncul adalah pendapat Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick kepercayaan Presiden Bush. Dalam tulisannya di International Herald Tribune tanggal 25 -26 Oktober 2008 menyarankan jalan keluarnya adalah *meredifine multilateralism* yaitu dengan ide membangun kerjasama dan intrconnected antar negara. Ide ini sama sekali tidak cukup dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Ide itu tidak akan ampuh untuk bisa keluar dari krisis keuangan yang terus menerus dan merugikan sebahagian besar penduduk bumi hanya karena kelakuan orang yang dibiarkan/dilindungi oleh sistem dimana modal, valas dan tingkat bunga dibiarkan bebas dipertainkan para "koruptor" ekonomi dunia. Ekonomi Islam sudah jauh jauh menyarankan agar uang tidak boleh dibiarkan dibawah asuhan para kapitalis dia harus secara sistemik diikat oleh kontrol Emas sebagaimana konsep Keynes dan Bretton Wood.

Sofyan S. Harahap
Editor of Chief

INDIKATOR KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA: Implementasi Paradigma Pembangunan atas Data Makro Ekonomi

Mulyanto

Jurusan Ekonomi Pembangunan – Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret

Abstract

The purpose of this study was to identify the macroeconomic variables as an indicator of the progress of regional development in Indonesia. Using the data of province in Indonesia covering: (i) Gross Regional Domestic Product (total and without oil and gas), (ii) Human Development Index, and (iii) Regional Development Index; there were many interesting implications to construct the regional development policy. From this study, the local leaders can improve the performance of the regional development by developing the indicators for measuring the progress of regional development in their regions.

Keywords: *Regional Development Index, Indonesia*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik (Moeljarto, 1995: xi). Lebih jauh dikatakan bahwa peradaban manusia tidak akan mencapai wujudnya yang sekarang, apabila tidak terjadi proses perubahan sosial yang terus-menerus meskipun dengan intensitas yang bervariasi, pada masa lalu dan dari waktu ke waktu. Pengertian lain menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun kelompok, dengan cara-

cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam (Johan Galtung (1980) dalam Lambang Trijono, 2007: 3). Pembangunan dengan makna yang sangat luas seperti di atas, diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama terjadinya proses modernisasi dan perubahan budaya masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dalam perkembangannya, muncul variasi mengenai makna dan konsep-konsep pembangunan yang disertai dengan berbagai macam indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan/kemajuannya. Pengertian pembangunan dapat

berbeda dari kultur atau negara yang satu dengan kultur atau negara yang lain (*culture specific*), dari situasi yang satu ke situasi yang lain (*situation specific*), dan dari periode yang satu ke periode yang lain (*time specific*). Oleh karenanya sangat penting untuk mengetahui dan mengamati dinamika pergeseran konsep-konsep pembangunan dari waktu ke waktu.

Di lain pihak pemahaman mengenai indikator keberhasilan pembangunan juga menjadi semakin menarik, dengan melihat adanya indikator-indikator pembangunan yang sudah mulai bergeser dari sekedar pendekatan ekonomi ke pendekatan non-ekonomi serta ke pendekatan gabungan. Pembangunan juga bukan hanya terkait dengan masalah nilai yang sering kali terkait dengan prinsip pandangan hidup di suatu masyarakat atau negara, akan tetapi juga menyangkut masalah pilihan politik yang akan dianut. Pilihan-pilihan politik ini selanjutnya akan mempengaruhi strategi dan perumusan kebijakan yang akan diambil oleh para penentu kebijakan, sehingga wacana ke arah penerapan ekonomi kelembagaan menjadi bagian yang idealnya tidak terpisah dalam merumuskan makna, konsep dan indikator kemajuan pembangunan.

Pergeseran Makna dan Konsep Pembangunan, Strategi Pem-

angunan dan Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah

Makna dan Konsep Pembangunan: Masalah Perbedaan Persepsi dari Waktu ke Waktu

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari satu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi [Saul M. Katz (1971)] dan menyangkut proses perbaikan [Dudley Seers (1970)] (Moeljarto, 1995: 3). Batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut, di dalam realitasnya menimbulkan interpretasi yang sering bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga mudah menimbulkan salah persepsi dan multi tafsir. Dengan kata lain, berdasar latar keahlian yang berbeda banyak ahli yang mengartikan pembangunan menurut versinya masing-masing. Meier dan Baldwin dalam (Irawan Kadiman, 2001: 3) misalnya, mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional, termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Sementara menurut Todaro (2000: 20), pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem nasional secara keseluruhan, tanpa mengabaikan kera-

gaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual.

Konsep Todaro di atas dikembangkan dari konsep sebelumnya (-tahun 1981-), yang memberi makna pembangunan sebagai suatu proses perbaikan kualitas semua segi kehidupan manusia yang mencakup 3 (tiga) aspek penting. Pertama, aspek peningkatan taraf hidup masyarakat, melalui proses pertumbuhan ekonomi. Kedua, aspek penciptaan kondisi yang mendukung perkembangan harga diri melalui sistem ekonomi, politik dan sosial yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia. Ketiga, aspek perluasan kebebasan rakyat dalam memilih melalui daerah pilihan yang diperlebar, dengan memperbanyak varitas barang konsumsi dan jasa yang tersedia (Todaro (1981) dalam Suyudi Mangunwihardjo, 2008: 1).

Terlepas dari berbagai permasalahan kurun waktu, baik sebelum maupun selama dan sesudah abad ke-21, pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu proses jangka panjang dalam upaya untuk terus meningkatkan pendapatan nasional per kapita penduduk dan masyarakat menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Irawan Kadiman, 2001: 3-5).

Pada awalnya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh Negara Miskin/Berkembang adalah Pem-

angunan Ekonomi atau Pertumbuhan Ekonomi, yang merupakan 2 (dua) istilah yang tidak sama. Pertumbuhan adalah perlu namun belum cukup untuk pembangunan. Pertumbuhan Ekonomi mengacu pada konsep peningkatan produksi suatu negara atau Pendapatan Perkapita. Produksi biasanya diukur dengan GNP (*Gross National Product*) atau GNI (*Gross National Income*), yang digunakan secara bergantian, yang menunjukkan output total dari barang-barang dan jasa-jasa dalam suatu perekonomian. Sementara itu Pembangunan Ekonomi mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan dalam distribusi output dan perubahan struktur perekonomian. Perubahan-perubahan ini mungkin mencakup: (i) Perbaikan secara materi penduduk miskin yang mencakup setengah dari jumlah penduduk; (ii) Penurunan sumbangan sektor pertanian terhadap GNP, yang dikaitkan dengan peningkatan dalam sumbangan sektor industri dan jasa dalam GNP; (iii) Peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja, dan (iv) Peningkatan teknologi secara substansi yang dikaitkan dengan kondisi khusus suatu negara (spesialisasi). Seperti halnya dengan perkembangan seorang anak, pertumbuhan membutuhkan suatu penekanan atas besaran/ukuran kuantitatif (tinggi atau GNP), dimana pembangunan menggam-barkan adanya perhatian terhadap perubahan dalam tingkat kemampuan, seperti kemampuan mengadakan koordinasi secara

fisik dan juga kemampuan untuk terus belajar, atau kemampuan ekonomi untuk beradaptasi terhadap pergeseran dalam citarasa/selera dan teknologi. Pembangunan Ekonomi tidak hanya mengacu pada tingkat perubahan dalam kesejahteraan ekonomi tetapi juga menyangkut kualitas tingkat perubahannya. Antara tahun 1870 dan 1998, Jepang mempunyai tingkat kecepatan pembangunan ekonomi yang baik. Tingkat pertumbuhan GNP riil sekitar 2,6% per tahun, dan juga ada inovasi teknologi secara substansial, peningkatan dalam distribusi pendapatan nasional, dan juga penurunan di dalam sumbangan angkatan kerja pada sektor pertanian. Jepang juga mempunyai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi yang ditunjukkan oleh besarnya nilai GNI / Kapita atas dasar harga berlaku pada 2003 sebesar \$ 34.510, menempati urutan 4 (empat) besar negara-negara terkaya di Dunia. Indikasi ukuran lainnya yaitu banyak penduduk Jepang yang makmur dan mempunyai tempat tinggal, berada dalam tingkat kesehatan yang baik, dan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, serta hanya sedikit penduduk Jepang yang masuk dalam kategori miskin (Nafziger, 2006: 15-20).

Dari berbagai uraian di atas, secara umum rentangan perbedaan mengenai konsep dan makna pembangunan antara lain menyangkut pokok permasalahan-permasalahan sebagai berikut

(Moeljarto, 1995: 3-4 dan Arief Budiman, 2000: 1-2):

- a. Hakekat nilai pembangunan yang harus dicapai (-indikator ekonomi klasik versus indikator non-ekonomi-),
- b. Perbedaan persepsi tentang hakekat proses pembangunan itu sendiri - teori konflik versus teori keseimbangan/ ekulibrium
- c. Perbedaan pendapat mengenai penahapan dan jalur pembangunan (-*unlinear* versus *linear* dan *necessity model* versus *possibility model*-),
- d. Perbedaan persepsi tentang hubungan antar bangsa di dalam proses pembangunan (*dependency model* versus *difusionism*),
- e. Perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya (*limit to growth* versus *models of doom*),
- f. Perbedaan pandangan tentang pemilikan faktor produksi (*capitalist mode of production* versus *socialist mode of production*),
- g. Perbedaan dalam strategi pembangunan (pertanian versus industri, *big push strategy* versus *unbalanced growth strategy*),
- h. Dan sebagainya.

Strategi Pembangunan

Setelah Perang Dunia II, banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) melakukan pembangunan di negaranya. Tujuannya jelas yaitu untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara yang lain. Strategi yang ditempuh juga bermacam-

macam, yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (Moeljarto, 1995: 32-6 dan juga dalam Gunawan Sumodiningrat, 2007: 19-30): (i) Model Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan; (ii) Model Pembangunan Berorientasi pada Kebutuhan Dasar atau Kesejahteraan; dan (iii) Model Pembangunan Berorientasi pada Manusia. Gambaran perbedaan dalam ketiga pendekatan ini, secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.

a. Model Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan

Dalam model ini, tujuan pembangunan dipandang sebagai pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, yaitu menyangkut penggunaan atau kapasitas ekonomi dalam menghasilkan peningkatan GNP (*Gross National Product*) per tahun dalam kisaran angka 5% sampai 7% atau lebih. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Dekade Pembangunan Pertama (1960-1970) memandangkan 'pembangunan' dalam arti mencapai angka pertumbuhan GNP per tahun sebesar 6%. Guna mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemilihan struktur produksi dan kesempatan kerja yang terencana guna meningkatkan proporsi industri jasa dan manufaktur, serta mengurangi porsi sektor pertanian secara seimbang, tidak dapat dihindari. Karena proses pembangunan terpusat pada produksi, sedang penghapusan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menduduki urutan

kedua, terutama melalui konsep 'trickle-down effect'¹) (Moeljarto, 1995: 32).

Dua teori besar yang mewarnai strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, khususnya pada masa setelah Perang Dunia II (sebagaimana yang banyak diterapkan di berbagai negara) adalah Teori Rostow mengenai Tahap-Tahap Pertumbuhan dalam Pembangunan Ekonomi²) dan Teori

¹*Trickle-Down Effect* yang awalnya diyakini terjadi seiring dengan terbentuknya akumulasi kapital nasional ternyata tidak berjalan. Dengan kata lain, di satu sisi pendekatan ini meningkatkan konsentrasi kapital, di sisi lain menciptakan marginalisasi, baik marginalisasi Desa oleh Kota maupun marginalisasi Penduduk Miskin oleh Penduduk Kaya. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan konsep ketimpangan atau kesenjangan, dimana kesenjangan akan terjadi jika 20% penduduk yang tergolong kaya menerima 50% atau lebih dari GNP (Sri-Edi Swasono, 2008a: 21).

²Tahap-tahap pembangunan yang diperkenalkan oleh Rostow, antara lain mencakup 5 (lima) tahap, yaitu: (i) Tahap Masyarakat Tradisional, (ii) Tahap Prakondisi untuk Tinggal Landas Menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan; (iii) Tahap Tinggal Landas; (iv) Tahap Menuju Masyarakat Dewasa; serta (v) Tahap Masa Konsumsi Tinggi. Buku-buku teks ekonomi pembangunan sering mengungkapkan penjelasan dari kelima tahap ini, yang antara lain dapat ditemukan di Lincoln Arsyad (1999),

Harrod-Domar mengenai Pertumbuhan Ekonomi. Dalam konsep Rostow, tahap kritis bagi Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah 'tahap tinggal landas' dimana masyarakat yang sedang berkembang akan bertransformasi menuju masyarakat maju. Selanjutnya Rostow berpendapat bahwa salah satu prinsip yang perlu dijalankan dalam tahapan ini adalah mobilisasi tabungan domestik dan tabungan luar negeri, guna menghasilkan investasi yang cukup untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Todaro (1994) dalam Gunawan Sumodiningrat, 2007: 19-20).

Uraian Rostow mengenai investasi diperdalam dalam Teori Harrod-Domar mengenai pertumbuhan ekonomi. Saran dari Harrod-Domar yaitu agar perekonomian dapat tumbuh, suatu perekonomian harus memiliki tabungan dan investasi dalam proporsi tertentu terhadap GNP. Makin besar tabungan dan investasi, makin cepat perekonomian tumbuh (Todaro (1994) dalam Gunawan Sumodiningrat, 2007: 20).

b. Model Pembangunan Berorientasi pada Kebutuhan Dasar atau Kesejahteraan

Model ini muncul untuk mengoreksi beberapa kekurangan dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Fokus atau sasaran dari model

pembangunan ini adalah bagian penduduk miskin di Negara Sedang Berkembang (NSB), dan menandakan bahwa masalah kemiskinan di NSB pada dasarnya bukanlah merupakan kemubaziran ekonomi *perse*, akan tetapi pada hakekatnya merupakan pengalaman kerja keras dan tidak produktif selama berjam-jam dalam rangka membiayai kehidupan subsistensi dan marginal dari penduduk miskin. Jadi problem utamanya adalah mengupayakan peningkatan kualitas/mutu kerja mereka lebih dari pada kuantitas/jumlah jam kerjanya. Di samping itu, program kesejahteraan atau bantuan bagi orang yang sangat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup tidak hanya kesempatan dalam memperoleh penghasilan, tetapi juga akses dari pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum dan sebagainya. Dengan demikian, model ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung, dan tidak semata-mata hanya melalui mekanisme '*trickle-down effect*' (Moeljarto, 1995: 33).

Argumentasi model kebutuhan dasar atau kesejahteraan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Paul Streeten (1979) dan juga S.J. Burki dan Mahbub Ul Haq (1981) adalah sebagai berikut (Moeljarto, 1995: 33-4):

- 1) Banyak kaum miskin yang tidak memiliki aset produktif selain kekuatan fisik mereka, keinginan kerja mereka dan inteligensi dasar mereka. Pemeliharaan aset tersebut tergantung

Mudrajad Kuncoro (1997), Nafziger, E. Wayne (2006), Sadono Sukirno (2006) dan sebagainya.

pada peningkatan akses kepada pelayanan publik seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan air pada umumnya.

- 2) Peningkatan pendapatan kaum miskin boleh jadi tidak meningkatkan standar hidup mereka kalau barang-barang dan jasa yang cocok dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.
- 3) Peningkatan standar hidup golongan termiskin dari yang miskin melalui peningkatan produktivitas mereka memerlukan waktu yang sangat lama, dan dalam porsi tertentu karena satu dan lain hal, mereka tetap tidak dapat bekerja. Paling tidak adanya program subsidi jangka pendek, dan barang kali program subsidi permanen, diperlukan agar rakyat mendapat bagian dari hasil-hasil pembangunan.

Dengan dirumuskannya model pembangunan pada periode 1970-an yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan, dan pengangguran; mengilhami Todaro untuk merumuskan kembali makna/arti pembangunan. Dalam kaitan ini, Todaro mengartikan pembangunan ekonomi sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional, selain juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pemberantasan kemiskinan (Gunawan Sumodiningrat, 2007: 21-2).

c. Model Pembangunan Berorientasi pada Manusia

Model pembangunan ini berpusat pada insan/manusia, berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan *sustainability* manusia menjadi fokus sentral proses pembangunan, pelaksana pembangunan yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan untuk mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (Gran (1983) dalam Moeljarto, 1995: 35).

Perspektif baru pembangunan tersebut memberikan peranan khusus kepada Pemerintah, yang jelas berbeda dengan peranan pemerintah pada 2 (dua) model yang terdahulu. Peranan pemerintah dalam model ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan untuk berkembang, yang sekaligus dapat mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi manusia secara lebih besar. Pembentukan jaringan organisasi informal dan arus komunikasi pada kebutuhan dan variasi lokal (daerah) merupakan pelengkap dari sistem komando yang lebih formal. Dan hal ini sangat tergantung pada inisiatif rakyat untuk berkreasi pada sumber-sumber informasi yang ada.

Model pembangunan yang berorientasi pada manusia sering diistilahkan dengan model pemberdayaan (*empowerment*). Model ini muncul dengan 2 (dua) premis

mayor, yaitu kegagalan dan harapan. Premis mayor kegagalan, mengandung maksud mengenai gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedang Premis mayor harapan, mengandung maksud adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi secara memadai. Kegagalan dan harapan ini bukan merupakan alat ukur ilmu-ilmu sosial, melainkan cerminan nilai-nilai normatif dan moral yang terasa sangat nyata di tingkat individu dan masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual (Gunawan Sumodiningrat, 2007: 27-8).

Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah

Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik diperlukan dukungan sistem informasi yang relevan, serta dibutuhkan pengetahuan tentang indikator-indikator pembangunan dari hasil pembangunan itu sendiri. Penyusunan indikator-indikator pembangunan dapat dilakukan dari berbagai pendekatan dan kepentingan, yang antara lain berupa pendekatan menurut bidang pembangunan, menurut sektor-sektor pembangunan dan juga menurut

kepentingan yang lain. Badan Perencanaan Daerah pada beberapa waktu yang lalu menggunakan indikator pembangunan yang dikategorikan ke dalam indikator bidang ekonomi, indikator sosial, dan indikator fisik prasarana (BAPEDA Kabupaten Klaten, 2004).

Saat ini dikembangkan indikator-indikator lain yang cukup luas, yang tidak sekedar indikator PDB/PDRB, namun sudah mencakup dimensi dan aspek lain selain faktor ekonomi. Indikator-indikator tersebut secara umum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (i) Indikator yang mencakup hasil interaksi dari berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu pola normal atau pola optimal; dan (ii) Indikator yang menangkap kualitas hidup. Pada bagian berikut akan dijabarkan secara rinci mengenai indikator-indikator pembangunan yang disarikan dari Todaro (2000) dan Kahlil Rowter (1996).

Indikator Kemajuan Pembangunan Propinsi

Indikator Ekonomi

Hasil pembangunan daerah biasanya diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam konteks provinsi, biasanya dipublikasikan 2 (dua) besaran PDRB, yaitu: (i) PDRB Total (Migas dan Non-Migas); dan (ii) PDRB Tanpa Migas.

a. Total PDRB (Migas dan Non-Migas)

Total PDRB [Migas dan Non-Migas] sebagai salah satu indikator ekonomi untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 2000, 2002 dan 2004 menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. Total PDRB seluruh provinsi di Indonesia yang pada tahun 2000 hanya sebesar Rp 1.389,77 triliun, pada tahun 2002 menjadi Rp 1.506,12 triliun; serta pada tahun 2004 telah meningkat menjadi Rp 1.660,58 triliun. Bila dilihat dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 2000 ke 2004 relatif mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp 62,42 triliun menjadi Rp 74,75 triliun. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyimpangan terhadap reratanya semakin meningkat. Secara umum rerata PDRB provinsi di Indonesia juga mengalami peningkatan dari Rp 45,29 triliun (2000) menjadi Rp 48,99 triliun (2002), serta menjadi Rp 53,58 triliun (2004).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar Total PDRB pada tahun 2004, dapat dilihat bahwa 4 (empat) provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI JAKARTA, sebesar Rp 279,15 triliun; (ii) JAWA TIMUR, sebesar Rp 242,17 triliun; (iii) JAWA BARAT, sebesar Rp 232,18 triliun; dan (iv) JAWA TENGAH, sebesar Rp 135,79 triliun. Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, yaitu: Provinsi RIAU,

sebesar Rp 104,66 triliun. Untuk peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) BANGKA BELI-TUNG, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) BENGKULU, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) MALUKU, sebesar Rp 3,10 triliun; (iv) MALUKU UTARA, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) GORONTALO, sebesar Rp 1,89 triliun.

2) Status Perkembangan PDRB Total

Status perkembangan PDRB Total pada tahun 2004 yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai terhadap Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii) Kuadran 3: Nilai terhadap Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa SUMATERA UTARA, DKI JAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, dan BANTEN termasuk dalam satu kelompok di Kuadran 4. Sedang NANGGROE ACEH DARUSSALAM, SUMATERA SELATAN, BANGKA BELITUNG, DI YOGYAKARTA, BALI, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI UTARA, MALUKU, MALUKU UTARA, dan PAPUA; masuk dalam satu kelompok di Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

b) PDRB Tanpa Migas

PDRB Tanpa Migas sebagai salah satu indikator ekonomi untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 2000, 2002 dan 2004 atas dasar harga konstan 2000, menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. Total PDRB Tanpa Migas seluruh provinsi di Indonesia yang pada tahun 2000 hanya sebesar Rp 1.218,33 triliun, pada tahun 2002 menjadi Rp 1.345,81 triliun; serta pada tahun 2004 telah meningkat menjadi Rp 1.511,76 triliun. Bila dilihat dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 2000 ke 2004 relatif mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp 59,40 triliun menjadi Rp 72,05 triliun. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyimpangan terhadap reratanya semakin meningkat. Secara umum rerata PDRB Tanpa Migas provinsi di Indonesia juga mengalami peningkatan dari Rp 39,72 triliun (2000) menjadi Rp 43,35 triliun (2002), serta menjadi Rp 48,09 triliun (2004).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar Total PDRB pada tahun 2004, dapat dilihat bahwa 4 (empat) provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI JAKARTA, sebesar Rp 278,16 triliun; (ii) JAWA TIMUR, sebesar Rp 241,56 triliun; (iii) JAWA BARAT, sebesar Rp 213,75 triliun; dan (iv) JAWA TENGAH, sebesar Rp 127,21 triliun. Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, yaitu: Provinsi

SUMATERA UTARA, sebesar Rp 82,68 triliun (-untuk Total PDRB diduduki oleh Provinsi Riau-). Hal ini menjadi pertanda bahwa peran sektor Migas di Provinsi Riau sangat berpengaruh bagi perekonomian wilayah. Untuk peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) BANGKA BELITUNG, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) BENGKULU, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) MALUKU, sebesar Rp 3,09 triliun; (iv) MALUKU UTARA, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) GORONTALO, sebesar Rp 1,89 triliun.

2) Status Perkembangan PDRB Tanpa Migas

Status perkembangan PDRB Tanpa Migas pada tahun 2004 yang dibagi ke dalam 4 kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai terhadap Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii) Kuadran 3: Nilai terhadap Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa hanya Provinsi RIAU saja yang termasuk dalam kelompok di Kuadran 4. Sedang NANGGROE ACEH DARUSSALAM, SUMATERA BARAT, SUMATERA SELATAN, BENGKULU, LAMPUNG, BANGKA BELITUNG, DI YOGYAKARTA, BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI

UTARA, SULAWESI SELATAN, MALUKU, MALUKU UTARA, dan PAPUA; masuk dalam satu kelompok di Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Indikator Gabungan

Implementasi indikator gabungan yang akan dibahas pada bagian ini, secara umum akan dibagi dalam 2 bagian, yaitu indikator gabungan yang berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator gabungan yang berupa Indeks Pembangunan Daerah (IPD).

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM sebagai salah satu indikator gabungan untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 1999, 2002 dan 2005, menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. Nilai IPM di Indonesia yang pada tahun 1999 sebesar 64,30, pada tahun 2002 menjadi 65,80; serta pada tahun 2005 telah meningkat menjadi 68,70. Bila dilihat dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 1999 ke 2005 relatif mengalami penurunan, yaitu dari sekitar 3,58 menjadi 3,48. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyimpangan terhadap reratanya semakin menurun. Secara umum rerata IPM di Indonesia juga mengalami peningkatan dari 64,40 (1999) menjadi 66,15 (2002), serta menjadi 68,36 (2005).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar nilai IPM pada tahun 2005, yaitu: (i) DKI JAKARTA, sebesar 75.80; (ii) SULAWESI UTARA, sebesar 73.40; (iii) DI YOGYA-KARTA, sebesar 72.90; (iv) RIAU, sebesar 72.20; dan (v) KALIMANTAN TIMUR, sebesar 72.20. Untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPM terkecil adalah: (i) SULAWESI BARAT, sebesar 64.40; (ii) IRIAN JAYA BARAT, sebesar 63.70; (iii) NUSA TENGGARA TIMUR, sebesar 62.70; (iv) PAPUA, sebesar 60.90; dan (v) NUSA TENGGARA BARAT, sebesar 60.60.

2) Status Perkembangan IPM

Status perkembangan IPM pada tahun 2004 yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai terhadap Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii) Kuadran 3: Nilai terhadap Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa SUMATERA BARAT, RIAU, JAMBI, SUMATERA SELATAN, BENGKULU, BANGKA BELITUNG, dan JAWA BARAT; termasuk dalam satu kelompok di Kuadran 4. Sedang JAWA TIMUR, BANTEN, NUSA TENGGARA TIMUR, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, GORONTALO,

MALUKU UTARA, dan PAPUA; masuk dalam satu kelompok di Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

b. Indeks Pembangunan Daerah (IPD)

IPD sebagai salah satu indikator gabungan untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 1994, 1996 dan 1998, menunjukkan perkembangan yang cukup bervariasi. Nilai IPD di Indonesia yang pada tahun 1994 sebesar 4,5678 pada tahun 1996 menjadi sebesar 4,7316; pada tahun 1998 turun menjadi 4,6149. Bila dilihat dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 1994 ke 1998 relatif mengalami penurunan, yaitu dari sekitar 0,5988 menjadi 0,5131. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyimpangan terhadap reratanya semakin menurun, walaupun pada tahun 1996 justru meningkat (sebesar 0,6328). Secara umum rerata IPD di Indonesia juga bervariasi dari sebesar 4,5678 (1994) menjadi 4,7316 (1996), serta menjadi 4,6149 (1998).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar nilai IPD pada tahun 1998, yaitu: (i) DKI JAKARTA, sebesar 6.2800; (ii) BALI, sebesar 5.7618; (iii) DI YOGYAKARTA, sebesar 5.5018; (iv) BENGKULU, sebesar 4.7831; dan (v) SULAWESI TENGGARA, sebesar 4.7640. Untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPD terkecil adalah: (i) JAMBI, sebesar 4.1975; (ii) MALUKU, sebesar

4.1761; (iii) JAWA BARAT, sebesar 4.1376; (iii) NUSA TENGGARA TIMUR, sebesar 4.1260, dan (v) PAPUA, sebesar 4.0951.

2) Status Perkembangan IPD

Status perkembangan IPD pada tahun 1998 yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai terhadap Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii) Kuadran 3: Nilai terhadap Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa SULAWESI UTARA, SULAWESI SELATAN, dan SULAWESI TENGGARA; termasuk dalam satu kelompok di Kuadran 4. Sedang RIAU, JAMBI, JAWA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR, MALUKU, dan PAPUA; masuk dalam satu kelompok di Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

PENUTUP

Simpulan

Berdasar pada pembahasan di atas, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- Banyak definisi/pengertian mengenai konsep pembangunan. Dalam perkembangannya, muncul variasi mengenai makna dan konsep-konsep pembangunan

yang disertai dengan berbagai macam indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan/kemajuannya. Pengertian pembangunan dapat berbeda dari kultur atau negara yang satu dengan kultur atau negara yang lain (*culture specific*), dari situasi yang satu ke situasi yang lain (*situation specific*), dan dari periode yang satu ke periode yang lain (*time-specific*). Secara umum rentangan perbedaan mengenai konsep dan makna pembangunan antara lain menyangkut pokok permasalahan-permasalahan: (i) Hakekat nilai pembangunan yang harus dicapai; (ii) Perbedaan persepsi tentang hakekat proses pembangunan itu sendiri; (iii) Perbedaan pendapat mengenai penahapan dan jalur pembangunan; (iv) Perbedaan persepsi tentang hubungan antar bangsa di dalam proses pembangunan; (v) Perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya; (vi) Perbedaan pandangan tentang pemilikan faktor produksi; dan (vii) Perbedaan dalam strategi pembangunan.

b. Strategi/model pembangunan yang ditempuh oleh berbagai negara, khususnya oleh Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam melaksanakan program-program pembangunan secara umum dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (i) Model Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan;

(ii) Model Pembangunan Berorientasi pada Kebutuhan Dasar atau Kesejahteraan; dan (iii) Model Pembangunan Berorientasi pada Manusia.

c. Implementasi atas konsep pembangunan dengan berbagai macam indikator kemajuan pembangunan yang selama ini dipakai masih dominan pada aspek-aspek yang terkait dengan masalah ekonomi, seperti ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan sebagainya. Sementara indikator yang bersifat non-ekonomi, seperti indikator sosial dan fisik prasarana serta indikator yang sifatnya gabungan belum banyak dijadikan pengkajian dan *based-data* secara baik.

d. Indikator ekonomi yang menjadi ukuran untuk melihat prestasi atau hasil-hasil pembangunan daerah yang berupa: (i) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Total (dengan Migas dan Non-Migas), dan (ii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas; jika dikaitkan dengan besaran yang ada pada masing-masing daerah menjadi menarik. Beberapa yang dipandang menarik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Untuk PDRB Total (dengan Migas dan Non-Migas) harga konstan 2000 pada tahun 2004, jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar-

nya, 4 (empat) provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI JAKARTA, sebesar Rp 279,15 triliun; (ii) JAWA TIMUR, sebesar Rp 242,17 triliun; (iii) JAWA BARAT, sebesar Rp 232,18 triliun; dan (iv) JAWA TENGAH, sebesar Rp 135,79 triliun. Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, yaitu: Provinsi RIAU, sebesar Rp 104,66 trilun. Sedang untuk peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) BANGKA BELITUNG, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) BENGKULU, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) MALUKU, sebesar Rp 3,10 triliun; (iv) MALUKU UTARA, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) GORONTALO, sebesar Rp 1,89 triliun. Sementara itu, dengan memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari Total PDRB di Indonesia, provinsi yang mempunyai kategori NILAI RERATA TERHADAP NASIONAL DAN LAJU PERTUMBUHAN KATEGORI TINGGI pada tahun 2004, adalah; (i) SUMATERA UTARA; (ii) DKI JAKARTA; (iii) JAWA TENGAH; (iv) JAWA TIMUR; dan (v) BANTEN.

- 2) Untuk PDRB Tanpa Migas harga konstan 2000 pada tahun 2004, jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesarnya 4 (empat) provinsi di

antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI JAKARTA, sebesar Rp 278,16 triliun; (ii) JAWA TIMUR, sebesar Rp 241,56 triliun; (iii) JAWA BARAT, sebesar Rp 213,75 triliun; dan (iv) JAWA TENGAH, sebesar Rp 127,21 triliun. Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, yaitu: Provinsi SUMATERA UTARA, sebesar Rp 82,68 trilun (-untuk Total PDRB diduduki oleh Provinsi Riau-). Hal ini menjadi pertanda bahwa peran sektor Migas di Provinsi Riau sangat berpengaruh bagi perekonomian wilayah. Sementara itu, untuk peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) BANGKA BELITUNG, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) BENGKULU, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) MALUKU, sebesar Rp 3,09 triliun; (iv) MALUKU UTARA, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) GORONTALO, sebesar Rp 1,89 triliun. Di lain pihak, dengan memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari PDRB Tanpa Migas, provinsi yang mempunyai kategori NILAI RERATA TERHADAP NASIONAL DAN LAJU PERTUMBUHAN KATEGORI TINGGI pada tahun 2004, adalah Provinsi RIAU.

e. Indikator gabungan yang menjadi ukuran untuk melihat prestasi atau hasil-hasil pembangunan daerah berupa: (i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (ii) Indeks Pembangunan Daerah (IPD); jika dikaitkan dengan besaran yang ada pada masing-masing daerah menjadi menarik. Beberapa yang dipandang menarik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Untuk IPM pada tahun 2005, jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesarnya, yaitu: (i) DKI JAKARTA, sebesar 75.80; (ii) SULAWESI UTARA, sebesar 73.40; (iii) DI YOGYAKARTA, sebesar 72.90; (iv) RIAU, sebesar 72.20; dan (v) KALIMANTAN TIMUR, sebesar 72.20. Sedang untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPM terkecil adalah: (i) SULAWESI BARAT, sebesar 64.40; (ii) IRIAN JAYA BARAT, sebesar 63.70; (iii) NUSA TENGGARA TIMUR, sebesar 62.70; (iv) PAPUA, sebesar 60.90; dan (v) NUSA TENGGARA BARAT, sebesar 60.60. Sementara dengan memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari IPM, provinsi yang mempunyai kategori NILAI RERATA TERHADAP NASIONAL DAN LAJU PERTUMBUHAN KATEGORI TINGGI, adalah: (i) SUMATERA BARAT; (ii) RIAU; (iii) JAMBI; (iv)

SUMATERA SELATAN; (v) BENGKULU; (vi) BANGKA BELITUNG; dan (vii) JAWA BARAT.

2) Untuk IPD pada tahun 1998, jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesarnya, yaitu: (i) DKI JAKARTA, sebesar 6.2800; (ii) BALI, sebesar 5.7618; (iii) DI YOGYAKARTA, sebesar 5.5018; (iv) BENGKULU, sebesar 4.7831; dan (v) SULAWESI TENGGARA, sebesar 4.7640. Sedang untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPD terkecil adalah: (i) JAMBI, sebesar 4.1975; (ii) MALUKU, sebesar 4.1761; (iii) JAWA BARAT, sebesar 4.1376; (iii) NUSA TENGGARA TIMUR, sebesar 4.1260, dan (v) PAPUA, sebesar 4.0951. Sementara dengan memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari IPD, provinsi yang mempunyai kategori NILAI RERATA TERHADAP NASIONAL DAN LAJU PERTUMBUHAN KATEGORI TINGGI, adalah: (i) SULAWESI UTARA; (ii) SULAWESI SELATAN; dan (iii) SULAWESI TENGGARA.

Saran dan Implementasi Kebijakan

Saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan, berdasar pada hasil pengkajian

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Indikator yang bersifat non-ekonomi pada era-era sekarang ini, apalagi untuk mengukur kemajuan suatu daerah sangat mendesak untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2008, yang dalam bagian lampiran menyebutkan mengenai Aspek, Fokus, dan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Secara umum ada 3 (tiga) aspek yang menjadi pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu: (i) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, yang terdiri dari: Indikator Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Indikator Kesejahteraan Sosial, dan Indikator Seni Budaya dan Olah Raga; (ii) ASPEK PELAYANAN UMUM, yang terdiri dari Indikator Pelayanan Dasar, dan Indikator Pelayanan Penunjang; serta (iii) ASPEK DAYA SAING DAERAH, yang terdiri dari: Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah, Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Indikator Iklim Berinvestasi, dan Indikator Sumber Daya Manusia.
- b. Indikator hasil-hasil pembangunan daerah yang berupa PDRB, baik total maupun tanpa migas, bila dilihat dari besaran

nilainya sebagian besar juga masih berada di Pulau Jawa. Kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dengan meredistribusi kegiatan pembangunan di luar Pulau Jawa harus menjadi agenda pemerintah pada masa-masa mendatang. Hal ini terkait dengan masalah penduduk dan tingkat kepadatannya, yang disebagai besar di Pulau Jawa sudah melebihi ambang batas untuk ukuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang besarnya sekitar 10.000 penduduk / km².

- c. Jika dilihat besaran dari indikator pembangunan daerah yang berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan (ii) Indeks Pembangunan Daerah (IPD), menunjukkan bahwa peringkat terkecil sebagian besar masih berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Oleh karenanya berbagai upaya dalam meningkatkan mutu modal manusia dan juga mutu penyelenggaraan pemerintahan harus merupakan bagian dari tantangan yang harus dipikirkan dan diselesaikan oleh para pemimpin di masa-masa mendatang baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mappadjantji Amien. (2005). Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains

- Baru. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Achmad Rochjadi. (2005). "Prospek dan Tantangan Otonomi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan APBD dan Pembangunan Daerah". *Makalah* disampaikan pada kegiatan Workshop Nasional Prospek dan Peluang Obligasi Daerah bagi Keberhasilan Pembangunan Daerah, yang diadakan oleh Depkeu RI bekerja sama dengan PT Mitra Gemilang di Garden Palace Hotel Surabaya, 6-7 Juli.
- Ahmad Erani Yustika. (2006). *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia Publising.
- Arief Budiman. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Cetakan Keempat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik. (Berapa Terbitan). *Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004*. Jakarta: BPS.
- _____, BAPPENAS dan UNDP. (2004). *National Human Development Report 2004: The Economics of Democracy, Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS, BAPPENAS dan UNDP.
- Badan Perencanaan Daerah (BAPE-DA) Kab. Klaten. (2004). *Review Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Klaten Tahun 2001-2005*. Klaten: BAPEDA.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2001) "Indeks Pembangunan Daerah (Regional Development Index)". *Draft/Rancangan dalam Bentuk Ringkasan yang Diterbitkan oleh Bappenas di Jakarta, pada 29 Oktober*.
- Blakely, Edwar. (1994). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. London: Sage Publication.
- Dirjen Otda Depdagri dan Bappenas. (2002). *Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Mendukung Desentralisasi*. Jakarta: Dirjen Otda Depdagri dan Bappenas.
- Dirjen PKPD Depkeu RI. (2004.a). *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Dirjen PKPD.
- _____. (2004.b). *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003*. Jakarta: Dirjen PKPD.
- Gunawan Sumodiningrat. (2007). *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hera Susanti, Moh. Ikhsan M. dan Widyanti. (1995). *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Jakarta: LP FE-UI dan LPEM FE-UI.
- Hg. Suseno Triyanto Widodo. (1990). *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Irawan Kadiman. (2001). *Konsep dan Indikator Pembangunan*. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat IV. Jakarta: Penerbit LAN RI.

- Ji-Hyang Jang. (2002). *The Role of Institutional Accountability in Economics Development*. Texas: The University of Texas.
- Kahlil Rowter. (1996). "Indikator-Indikator Sosial Ekonomi". Bahan-bahan yang disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan di LPEM FE-UI Jakarta.
- Kasper, Wolfgang and Manfred E. Streit. (1998). *Institutional Economics: Social Order and Public Policy*. Northampton: Edwar Edgar.
- Lambang Triyono. (2007). *Pembangunan sebagai Perdamaian*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Lembaga Padii dan Yayasan Obor Indonesia.
- Lincoln Arsyad. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPF.
- LPEM FE-UI. (2003). "Teknik dan Metode-Metode Analisis Daerah". Bahan-bahan untuk Pendidikan dan Latihan Jenjang Jabatan Fungsional (Mata Kuliah Pendidikan dan Latihan Regional and Local Analysis).
- Moeljarto. (1995). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Morris David Marris. (1979). *Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Live Index*. USA: Pergamon Press.
- Mudrajad Kuncoro. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- _____. (2004). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Nafziger, E. Wayne. (2006). *Economics Development*, Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008. Jakarta: Penerbit CV Eko Jaya.
- Sadono Sukirno. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sri-Edi Swasono. (2008a). *Ekspos Ekonomika: Mewaspada Globalisme dan Pasar Bebas*, Edisi Baru 2008, Cetakan Keenam. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila - UGM.
- _____. (2008b). "Meninggalkan Ortodoksi dalam Pengajaran Ilmu Ekonomi", Orasi Ilmiah, Disampaikan dalam acara Seminar Nasional Memperingati Dies Natalis XXXII, di Aula Gedung IV Fakultas Ekonomi UNS, 14 April.
- Suyudi Mangunwihardjo. (2008). "Proses Politik dan Kegiatan Ekonomi" Supplement Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan

Program Doktor Ilmu Ekonomi
 UNDIP Semarang.
 Tulus Tambunan. (2006). *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Pasca Krisis*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Pustaka Quantum.

Todaro, Michael P. (2000). *Economic Development*, 7th Edition. New York: Wesley Longman, Inc.
 UNDP. (2006). *Human Development Report 2006 (Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis)*. New York: Palgrave Macmillan Ltd.

LAMPIRAN

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Tiga Strategi Pembangunan

Karakteristik	Strategi Pembangunan		
	Pertumbuhan	Kebutuhan Dasar	Berorientasi Manusia
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Fokus	Industri	Pelayanan	Manusia
2. Nilai	Berpusat pada Industri	Berkiblat pada Manusia	Berpusat pada Manusia
3. Indikator	Ekonomi Makro	Indikator Sosial	Hubungan Manusia dgn Sumber Daya
4. Peranan Pemerintah	<i>Entrepreneur</i>	<i>Service Provider</i>	<i>Enable / Facilitator</i>
5. Sumber Utama	Modal	Kemampuan Administratif dan Anggaran	Kreatifitas dan Komitmen
6. Kendala	Konsentrasi dan Marginalisasi	Keterbatasan Anggaran dan Inkompeten Aparat	Struktur dan Prosedur yang tidak Mendukung

Sumber: Moeljarto. (1995). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, halaman 26 [Matriks 2.1].

Tabel 2. Matrik Status Perkembangan PDRB [Non Migas dan Migas] Harga Konstan 2000, Berdasarkan Provinsi di Indonesia, Tahun 2004

Nilai terhadap Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi	Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi
(03) Sumatera Barat; (05) Jambi; (07) Bengkulu; (08) Lampung; (12) Jawa Barat; (18) Nusa Tenggara Barat; (19) Nusa Tenggara Timur; (25) Sulawesi Tengah; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Tenggara; dan (28) Gorontalo.	(02) Sumatera Utara; (11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur; dan (16) Banten.
Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah	Nilai terhadap Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah
(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (06) Sumatera Selatan; (09) Bangka Belitung; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (20) Kalimantan Barat; (21) Kalimantan Tengah; (22) Kalimantan Selatan; (24) Sulawesi Utara; (30) Maluku; (31) Maluku Utara; dan (32) Papua.	(04) Riau; dan (23) Kalimantan Timur.
Sumber: Diolah dari BPS. (berapa terbitan). <i>Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004</i> (Tabel 93, Tabel 95 dan Tabel 97)	

Tabel 3. Matrik Status Perkembangan PDRB [Tanpa Migas] Harga Konstan 2000, Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2004

Nilai terhadap Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi	Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi
(05) Jambi; (23) Kalimantan Timur; (25) Sulawesi Tengah; (27) Sulawesi Tenggara; dan (28) Gorontalo.	(04) Riau
Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah	Nilai terhadap Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah
(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (03) Sumatera Barat; (06) Sumatera Selatan; (07) Bengkulu; (08) Lampung; (09) Bangka Belitung; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (18) Nusa Tenggara Barat; (19) Nusa Tenggara Timur; (20) Kalimantan Barat; (21) Kalimantan Tengah; (22) Kalimantan Selatan; (24) Sulawesi Utara; (26) Sulawesi Selatan; (30) Maluku; (31) Maluku Utara; dan (32) Papua.	(02) Sumatera Utara; (11) DKI Jakarta; (12) Jawa Barat; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur; dan (16) Banten.

Sumber: Diolah dari BPS. (berapa terbitan). *Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004* (Tabel 98, Tabel 100 dan Tabel 102).

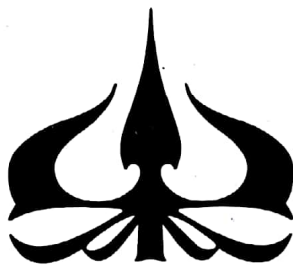
Tabel 4. Matrik Status Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2005

Nilai terhadap Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi	Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi
(18) Nusa Tenggara Barat; dan (25) Sulawesi Tengah.	(03) Sumatera Barat; (04) Riau; (05) Jambi; (06) Sumatera Selatan; (07) Bengkulu; (09) Bangka Belitung; dan (12) Jawa Barat.
Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah	Nilai terhadap Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah
(15) Jawa Timur; (16) Banten; (19) Nusa Tenggara Timur; (20) Kalimantan Barat; (22) Kalimantan Selatan; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Tenggara; (28) Gorontalo; (31) Maluku Utara; dan (32) Papua.	(02) Sumatera Utara; (08) Lampung; (11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (21) Kalimantan Tengah; (23) Kalimantan Timur; (24) Sulawesi Utara; dan (30) Maluku.
Sumber: -	Diolah dari BPS, BAPPENAS dan UNDP (2004). <i>NATIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2004: The Economics of Democracy, Financing Human Development in Indonesia</i> . Jakarta: BPS, BAPPENAS dan UNDP.
-	Diolah dari Kantor Menko Kesra. (2006). Konggres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia 2006.

Tabel 5. Matrik Status Perkembangan Indeks Pembangunan Daerah (IPD), Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 1998

Nilai terhadap Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi	Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi
(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (02) Sumatera Utara; (06) Sumatera Selatan; (08) Lampung; (11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur; (18) Nusa Tenggara Barat; (20) Kalimantan Barat; (21) Kalimantan Tengah; dan (25) Sulawesi Tengah.	(24) Sulawesi Utara; (26) Sulawesi Selatan; dan (27) Sulawesi Tenggara.
Nilai terhadap Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah	Nilai terhadap Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah
(04) Riau; (05) Jambi; (12) Jawa Barat; (19) Nusa Tenggara Timur; (30) Maluku; dan (32) Papua.	(03) Sumatera Barat; (07) Bengkulu; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (22) Kalimantan Selatan; dan (23) Kalimantan Timur.
Sumber: Diolah dari BAPPENAS. (2001) "Indeks Pembangunan Daerah (<i>Regional Development Index</i>)". Draft/Rancangan dalam bentuk Ringkasan yang diterbitkan oleh Bappenas Jakarta, pada 29 Oktober (Tabel 1).	

PEMBERITAHUAN



Berdasarkan Surat Keputusan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional R.I.

Nomor : 55/DIKTI/Kep/2005

Tanggal 17 Nopember 2005

Sejak terbitan Volume7, Nomor 3, Desember 2001,

Media Ekonomi

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

NASKAH ASLI
**INDIKATOR KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT
PROVINSI DI INDONESIA: Implementasi Paradigma Pembangunan atas
Data Makro Ekonomi**

MULYANTO
**Jurusan Ekonomi Pembangunan – Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

***Abstract:** The purpose of this study was to identify the macroeconomic variables as an indicator of the progress of regional development in Indonesia. Using the data of province in Indonesia covering: (i) Gross Regional Domestic Product (total and without oil and gas), (ii) Human Development Index, and (iii) Regional Development Index; there were many interesting implications to construct the regional development policy. From this study, the local leaders can improve the performance of the regional development by developing the indicators for measuring the progress of regional development in their regions.*

***Keywords:** Regional Development Indicators*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial menuju kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik (Moeljarto, 1995: xi). Lebih jauh dikatakan bahwa peradaban manusia tidak akan mencapai wujudnya yang sekarang, apabila tidak terjadi proses perubahan sosial yang terus-menerus meskipun dengan intensitas yang bervariasi, pada masa lalu dan dari waktu ke waktu. Pengertian lain menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individu maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam (Johan Galtung (1980) dalam Lambang Trijono, 2007: 3). Pembangunan dengan makna yang sangat luas seperti di atas, diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama terjadinya proses modernisasi dan perubahan budaya masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dalam perkembangannya, muncul variasi mengenai makna dan konsep-konsep pembangunan yang disertai dengan berbagai macam indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan/kemajuannya. Pengertian pembangunan dapat berbeda dari kultur atau negara yang satu dengan kultur atau negara yang lain (*culture specific*), dari situasi yang satu ke situasi yang lain (*situation specific*),

dan dari periode yang satu ke periode yang lain (*time specific*). Oleh karenanya sangat penting untuk mengetahui dan mengamati dinamika pergeseran konsep-konsep pembangunan dari waktu ke waktu.

Di lain pihak pemahaman mengenai indikator keberhasilan pembangunan juga menjadi semakin menarik, dengan melihat adanya indikator-indikator pembangunan yang sudah mulai bergeser dari sekedar pendekatan ekonomi ke pendekatan non-ekonomi serta ke pendekatan gabungan. Pembangunan juga bukan hanya terkait dengan masalah nilai yang sering kali terkait dengan prinsip pandangan hidup di suatu masyarakat atau negara, akan tetapi juga menyangkut masalah pilihan politik yang akan dianut. Pilihan-pilihan politik ini selanjutnya akan mempengaruhi strategi dan perumusan kebijakan yang akan diambil oleh para penentu kebijakan, sehingga wacana ke arah penerapan ekonomi kelembagaan menjadi bagian yang idealnya tidak terpisah dalam merumuskan makna, konsep dan indikator kemajuan pembangunan.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui status perkembangan indikator kemajuan pembangunan daerah tingkat provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan **Matrik Status Perekonomian**. Cakupan indikator kemajuan pembangunan daerah tingkat provinsi yang dimaksud mencakup: (i) Data Perkembangan PDRB [Non Migas dan Migas] Harga Konstan 2000 pada Tahun 2004; (ii) Data Perkembangan PDRB [Tanpa Migas] Harga Konstan 2000 Tahun 2004; (iii) Data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2005, dan (iv) Data Perkembangan Indeks Pembangunan Daerah (IPD) di Indonesia Tahun 1998.

TINJUAN PUSTAKA

Pergeseran Makna dan Konsep Pembangunan, Strategi Pembangunan dan Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah

Makna dan Konsep Pembangunan: Masalah Perbedaan Persepsi dari Waktu ke Waktu

Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari satu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi [Saul M. Katz (1971)] dan menyangkut proses perbaikan [Dudley Seers (1970)] (**Moeljarto, 1995: 3**). Batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut, di dalam realitasnya menimbulkan interpretasi yang sering bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga mudah menimbulkan salah persepsi

dan multi tafsir. Dengan kata lain, berdasar latar keahlian yang berbeda banyak ahli yang mengartikan pembangunan menurut versinya masing-masing. Meier dan Baldwin dalam (**Irawan Kadiman, 2001: 3**) misalnya, mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional, termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Sementara menurut Todaro (**2000: 20**), pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem nasional secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual.

Konsep Todaro di atas dikembangkan dari konsep sebelumnya (- tahun 1981-), yang memberi makna pembangunan sebagai suatu proses perbaikan kualitas semua segi kehidupan manusia yang mencakup 3 (tiga) aspek penting. Pertama, aspek peningkatan taraf hidup masyarakat, melalui proses pertumbuhan ekonomi. Kedua, aspek penciptaan kondisi yang mendukung perkembangan harga diri melalui sistem ekonomi, politik dan sosial yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia. Ketiga, aspek perluasan kebebasan rakyat dalam memilih melalui daerah pilihan yang diperlebar, dengan memperbanyak varitas barang konsumsi dan jasa yang tersedia (**Todaro (1981)** dalam **Suyudi Mangunwihardjo, 2008: 1**).

Terlepas dari berbagai permasalahan kurun waktu, baik sebelum maupun selama dan sesudah abad ke-21, pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu proses jangka panjang dalam upaya untuk terus meningkatkan pendapatan nasional per kapita penduduk dan masyarakat menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik (**Irawan Kadiman, 2001: 3-5**).

Pada awalnya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh Negara Miskin/Berkembang adalah Pembangunan Ekonomi atau Pertumbuhan Ekonomi, yang merupakan 2 (dua) istilah yang tidak sama. Pertumbuhan adalah perlu namun belum cukup untuk pembangunan. Pertumbuhan Ekonomi mengacu pada konsep peningkatan produksi suatu negara atau Pendapatan Perkapita. Produksi biasanya diukur dengan **GNP (Gross National Product)** atau **GNI (Gross National Income)**, yang digunakan

secara bergantian, yang menunjukkan output total dari barang-barang dan jasa-jasa dalam suatu perekonomian. Sementara Pembangunan Ekonomi mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan dalam distribusi output dan perubahan struktur perekonomian. Perubahan-perubahan ini mungkin mencakup: (i) Perbaikan secara materi penduduk miskin yang mencakup setengah dari jumlah penduduk; (ii) Penurunan sumbangan sektor pertanian terhadap GNP, yang dikaitkan dengan peningkatan dalam sumbangan sektor industri dan jasa dalam GNP; (iii) Peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja, dan (iv) Peningkatan teknologi secara substansi yang dikaitkan dengan kondisi khusus suatu negara (spesialisasi). Seperti halnya dengan perkembangan seorang anak, pertumbuhan membutuhkan suatu penekanan atas besaran/ukuran kuantitatif (tinggi atau GNP), dimana pembangunan menggambarkan adanya perhatian terhadap perubahan dalam tingkat kemampuan, seperti kemampuan mengadakan koordinasi secara fisik dan juga kemampuan untuk terus belajar, atau kemampuan ekonomi untuk beradaptasi terhadap pergeseran dalam citarasa/selera dan teknologi. Pembangunan Ekonomi tidak hanya mengacu pada tingkat perubahan dalam kesejahteraan ekonomi tetapi juga menyangkut kualitas tingkat perubahannya. Antara tahun 1870 dan 1998, Jepang mempunyai tingkat kecepatan pembangunan ekonomi yang baik. Tingkat pertumbuhan GNP riil sekitar 2,6% per tahun, dan juga ada inovasi teknologi secara substansial, peningkatan dalam distribusi pendapatan nasional, dan juga penurunan di dalam sumbangan angkatan kerja pada sektor pertanian. Jepang juga mempunyai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi yang ditunjukkan oleh besarnya nilai GNI / Kapita atas dasar harga berlaku pada 2003 sebesar \$ 34.510, menempati urutan 4 (empat) besar negara-negara terkaya di Dunia. Indikasi ukuran lainnya yaitu banyak penduduk Jepang yang makmur dan mempunyai tempat tinggal, berada dalam tingkat kesehatan yang baik, dan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, serta hanya sedikit penduduk Jepang yang masuk dalam kategori miskin (Nafziger, 2006: 15-20).

Dari berbagai uraian di atas, secara umum rentangan perbedaan mengenai konsep dan makna pembangunan antara lain menyangkut pokok permasalahan-permasalahan sebagai berikut (Moeljarto, 1995: 3-4 dan Arief Budiman, 2000: 1-2):

- a. Hakekat nilai pembangunan yang harus dicapai (indikator ekonomi klasik versus indikator non-ekonomi),

- b. Perbedaan persepsi tentang hakekat proses pembangunan itu sendiri (teori konflik versus teori keseimbangan/ekulibrium),
- c. Perbedaan pendapat mengenai penahapan dan jalur pembangunan (*unlinear* versus *linear* dan *necessity model* versus *possibility model*),
- d. Perbedaan persepsi tentang hubungan antar bangsa di dalam proses pembangunan (*dependency model* versus *difusionism*),
- e. Perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya (*limit to growth* versus *models of doom*),
- f. Perbedaan pandangan tentang pemilikan faktor produksi (*capitalist mode of production* versus *socialist mode of production*), dan
- g. Perbedaan dalam strategi pembangunan (pertanian versus industri, *big push strategy* versus *unbalanced growth strategy*),

Strategi Pembangunan

Setelah Perang Dunia II, banyak Negara Sedang Berkembang (NSB) melakukan pembangunan di negaranya. Tujuannya jelas yaitu untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara yang lain. Strategi yang ditempuh juga bermacam-macam, yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (Moeljarto, 1995: 32-6 dan juga dalam Gunawan Sumodiningrat, 2007: 19-30): (i) Model Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan; (ii) Model Pembangunan Berorientasi pada Kebutuhan Dasar atau Kesejahteraan; dan (iii) Model Pembangunan Berorientasi pada Manusia. Gambaran perbedaan dalam ketiga pendekatan ini, secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.

a. Model Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan

Dalam model ini, tujuan pembangunan dipandang sebagai pertumbuhan ekonomi dalam arti sempit, yaitu menyangkut penggunaan atau kapasitas ekonomi dalam menghasilkan peningkatan GNP (*Gross National Product*) per tahun dalam kisaran angka 5% sampai 7% atau lebih. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Dekade Pembangunan Pertama (1960-1970) memandang 'pembangunan' dalam arti mencapai angka pertumbuhan GNP per tahun sebesar 6%. Guna mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemilihan struktur produksi dan kesempatan kerja yang terencana guna meningkatkan proporsi industri jasa dan manufaktur, serta mengurangi porsi sektor pertanian secara seimbang, tidak dapat dihindari. Karena proses

pembangunan terpusat pada produksi, sedang penghapusan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menduduki urutan kedua, terutama melalui konsep '*trickle-down effect*'¹⁾ (Moeljarto, 1995: 32).

Dua teori besar yang mewarnai strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, khususnya pada masa setelah Perang Dunia II (sebagaimana yang banyak diterapkan di berbagai negara) adalah Teori Rostow mengenai Tahap-Tahap Pertumbuhan dalam Pembangunan Ekonomi²⁾ dan Teori Harrod-Domar mengenai Pertumbuhan Ekonomi. Dalam konsep Rostow, tahap kritis bagi Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah 'tahap tinggal landas' dimana masyarakat yang sedang berkembang akan bertransformasi menuju masyarakat maju. Selanjutnya Rostow berpendapat bahwa salah satu prinsip yang perlu dijalankan dalam tahapan ini adalah mobilisasi tabungan domestik dan tabungan luar negeri, guna menghasilkan investasi yang cukup untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Todaro (1994) dalam Gunawan Sumodiningrat, 2007: 19-20).

Uraian Rostow mengenai investasi diperdalam dalam Teori Harrod-Domar mengenai pertumbuhan ekonomi. Saran dari Harrod-Domar yaitu agar perekonomian dapat tumbuh, suatu perekonomian harus memiliki tabungan dan investasi dalam proporsi tertentu terhadap GNP. Makin besar tabungan dan investasi, makin cepat perekonomian tumbuh (Todaro (1994) dalam Gunawan Sumodiningrat, 2007: 20).

b. Model Pembangunan Berorientasi pada Kebutuhan Dasar atau Kesejahteraan

¹⁾*Trickle-Down Effect* yang awalnya diyakini terjadi seiring dengan terbentuknya akumulasi kapital nasional ternyata tidak berjalan. Dengan kata lain, di satu sisi pendekatan ini meningkatkan konsentrasi kapital, di sisi lain menciptakan marginalisasi, baik marginalisasi Desa oleh Kota maupun marginalisasi Penduduk Miskin oleh Penduduk Kaya. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan konsep ketimpangan atau kesenjangan, dimana kesenjangan akan terjadi jika 20% penduduk yang tergolong kaya menerima 50% atau lebih dari GNP (Sri-Edi Swasono, 2008a: 21).

²⁾Tahap-tahap pembangunan yang diperkenalkan oleh Rostow, antara lain mencakup 5 (lima) tahap, yaitu: (i) Tahap Masyarakat Tradisional, (ii) Tahap Prakondisi untuk Tinggal Landas Menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan; (iii) Tahap Tinggal Landas; (iv) Tahap Menuju Masyarakat Dewasa; serta (v) Tahap Masa Konsumsi Tinggi. Buku-buku teks ekonomi pembangunan sering mengungkapkan penjelasan dari kelima tahap ini, yang antara lain dapat ditemukan di Lincoln Arsyad (1999), Mudrajad Kuncoro (1997), Nafziger, E. Wayne (2006), Sadono Sukirno (2006) dan sebagainya.

Model ini muncul untuk mengoreksi beberapa kekurangan dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Fokus atau sasaran dari model pembangunan ini adalah bagian penduduk miskin di Negara Sedang Berkembang (NSB), dan menandakan bahwa masalah kemiskinan di NSB pada dasarnya bukanlah merupakan kemubaziran ekonomi *perse*, akan tetapi pada hakekatnya merupakan pengalaman kerja keras dan tidak produktif selama berjam-jam dalam rangka membiayai kehidupan subsistensi dan marginal dari penduduk miskin. Jadi problem utamanya adalah mengupayakan peningkatan kualitas / mutu kerja mereka lebih dari pada kuantitas / jumlah jam kerjanya. Di samping itu, program kesejahteraan atau bantuan bagi orang yang sangat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup tidak hanya kesempatan dalam memperoleh penghasilan, tetapi juga akses dari pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum dan sebagainya. Dengan demikian, model ini mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung, dan tidak semata-mata hanya melalui mekanisme 'trickle-down effect' (Moeljarto, 1995: 33).

Argumentasi model kebutuhan dasar atau kesejahteraan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Paul Streeten (1979) dan juga S.J. Burki dan Mahbub Ul Haq (1981) adalah sebagai berikut (Moeljarto, 1995: 33-4):

- 1) Banyak kaum miskin yang tidak memiliki aset produktif selain kekuatan fisik mereka, keinginan kerja mereka dan inteligensi dasar mereka. Pemeliharaan aset tersebut tergantung pada peningkatan akses kepada pelayanan publik seperti pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan air pada umumnya.
- 2) Peningkatan pendapatan kaum miskin boleh jadi tidak meningkatkan standar hidup mereka kalau barang-barang dan jasa yang cocok dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.
- 3) Peningkatan standar hidup golongan termiskin dari yang miskin melalui peningkatan produktivitas mereka memerlukan waktu yang sangat lama, dan dalam porsi tertentu karena satu dan lain hal, mereka tetap tidak dapat bekerja. Paling tidak adanya program subsidi jangka pendek, dan barang kali

program subsidi permanen, diperlukan agar rakyat mendapat bagian dari hasil-hasil pembangunan.

Dengan dirumuskannya model pembangunan pada periode 1970-an yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan, dan pengangguran; mengilhami Todaro untuk merumuskan kembali makna/arti pembangunan. Dalam kaitan ini, Todaro mengartikan pembangunan ekonomi sebagai proses multi-dimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional, selain juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pemberantasan kemiskinan (Gunan Sumodiningrat, 2007: 21-2).

c. Model Pembangunan Berorientasi pada Manusia

Model pembangunan ini berpusat pada insan / manusia, berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan *sustainability* manusia menjadi fokus sentral proses pembangunan, pelaksana pembangunan yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan untuk mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (Gran (1983) dalam Moeljarto, 1995: 35).

Perspektif baru pembangunan tersebut memberikan peranan khusus kepada Pemerintah, yang jelas berbeda dengan peranan pemerintah pada 2 (dua) model yang terdahulu. Peranan pemerintah dalam model ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan untuk berkembang, yang sekaligus dapat mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi manusia secara lebih besar. Pembentukan jaringan organisasi informal dan arus komunikasi pada kebutuhan dan variasi lokal (daerah) merupakan pelengkap dari sistem komando yang lebih formal. Dan hal ini sangat tergantung pada inisiatif rakyat untuk berkreasi pada sumber-sumber informasi yang ada.

Model pembangunan yang berorientasi pada manusia sering diistilahkan dengan model pemberdayaan (*empowerment*). Model ini muncul dengan 2 (dua) premis mayor, yaitu kegagalan dan harapan. Premis mayor kegagalan, mengandung maksud mengenai gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam

menang-gulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedang Premis mayor harapan, mengandung maksud adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi secara memadai. Kegagalan dan harapan ini bukan merupakan alat ukur ilmu-ilmu sosial, melainkan cerminan nilai-nilai normatif dan moral yang terasa sangat nyata di tingkat individu dan masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual (**Gunawan Sumodiningrat, 2007: 27-8**).

Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah

Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik diperlukan dukungan sistem informasi yang relevan, serta dibutuhkan pengetahuan tentang indikator-indikator pembangunan dari hasil pembangunan itu sendiri. Penyusunan indikator-indikator pembangunan dapat dilakukan dari berbagai pendekatan dan kepentingan, yang antara lain berupa pendekatan menurut bidang pembangunan, menurut sektor-sektor pembangunan dan juga menurut kepentingan yang lain. Badan Perencanaan Daerah pada beberapa waktu yang lalu menggunakan indikator pembangunan yang dikategorikan ke dalam indikator bidang ekonomi, indikator sosial, dan indikator fisik prasarana (**BAPEDA Kabupaten Klaten, 2004**).

Saat ini dikembangkan indikator-indikator lain yang cukup luas, yang tidak sekedar indikator PDB/PDRB, namun sudah mencakup dimensi dan aspek lain selain faktor ekonomi. Indikator-indikator tersebut secara umum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (i) Indikator yang mencakup hasil interaksi dari berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu pola normal atau pola optimal; dan (ii) Indikator yang menangkap kualitas hidup. Pada bagian berikut akan dijabarkan secara rinci mengenai indikator-indikator pembangunan yang disarikan dari **Todaro (2000)** dan **Kahlil Rowter (1996)**.

METODE PENELITIAN

Beberapa tahap yang dilaksanakan terkait dengan kegiatan pengkajian Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia yang merupakan usaha untuk menerapkan Paradigma Pembangunan atas data Makro Ekonomi, antara lain meliputi:

1. Pengumpulan Data

Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data sekunder dari berbagai dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sumber-sumber lain yang terkait dan relevan.

2. Cakupan Studi

Cakupan dalam pengkajian Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia mencakup:

- a. Data Perkembangan PDRB [Non Migas dan Migas] Harga Konstan 2000 pada Tahun 2004,
- b. Data Perkembangan PDRB [Tanpa Migas] Harga Konstan 2000 Tahun 2004,
- c. Data Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2005, dan
- d. Data Perkembangan Indeks Pembangunan Daerah (IPD) di Indonesia Tahun 1998

2.

3. Model Studi/Pengkajian

Model studi yang digunakan kegiatan pengkajian Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan Matrik Status Perekonomian, di mana secara umum, status perekonomian dibedakan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. **Kuadran 1**: Nilai terhadap rerata Nasional dan daya tumbuh terhadap Nasional rendah;
- b. **Kuadran 2**: Nilai terhadap rerata Nasional tinggi, tetapi daya tumbuh terhadap Nasional rendah;
- c. **Kuadran 3**: Nilai terhadap rerata Nasional rendah, tetapi daya tumbuh terhadap Nasional Tinggi; dan
- d. **Kuadran 4**: Nilai terhadap rerata Nasional dan daya tumbuh terhadap Nasional tinggi.

Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Matrik Status Perekonomian

\bar{R}	Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi KUADRAN 3	Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi KUADRAN 4
	Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah KUADRAN 1	Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah KUADRAN 2
	\bar{X} Nilai thd Rerata Nas.	

Sumber: Diolah dari BPS. (berapa terbitan). *Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004* (Tabel 93, Tabel 95 dan Tabel 97).

HASIL DAN PEMBAHASAN: Indikator Kemajuan Pembangunan Provinsi

Indikator Ekonomi

Hasil pembangunan daerah biasanya diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam konteks provinsi, biasanya dipublikasikan 2 (dua) besaran PDRB, yaitu: (i) PDRB Total (Migas dan Non-Migas); dan (ii) PDRB Tanpa Migas.

a. Total PDRB [Migas dan Non-Migas]

Total PDRB [Migas dan Non-Migas] sebagai salah satu indikator ekonomi untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 2000, 2002 dan 2004 menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. Total PDRB seluruh provinsi di Indonesia yang pada tahun 2000 hanya sebesar Rp 1.389,77 triliun, pada tahun 2002 menjadi Rp 1.506,12 triliun; serta pada tahun 2004 telah meningkat menjadi Rp 1.660,58 triliun. Bila dilihat dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 2000 ke 2004 relatif mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp 62,42 triliun menjadi Rp 74,75 triliun. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyimpangan terhadap reratanya semakin meningkat. Secara umum rerata PDRB provinsi di Indonesia juga mengalami peningkatan dari Rp 45,29 triliun (2000) menjadi Rp 48,99

triliun (2002), serta menjadi Rp 53,58 triliun (2004). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3.1.a.

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar Total PDRB pada tahun 2004, dapat dilihat bahwa 4 (empat) provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar Rp 279,15 triliun; (ii) Jawa Timur, sebesar Rp 242,17 triliun; (iii) Jawa Barat, sebesar Rp 232,18 triliun; dan (iv) Jawa Tengah, sebesar Rp 135,79 triliun. Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, yaitu: Provinsi Riau, sebesar Rp 104,66 triliun. Untuk peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) Bangka Belitung, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) Bengkulu, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) Maluku, sebesar Rp 3,10 triliun; (iv) Maluku Utara, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) Gorontalo, sebesar Rp 1,89 triliun.

2) Status Perkembangan PDRB Total

Status perkembangan PDRB Total pada tahun 2004 yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii) Kuadran 3: Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten termasuk dalam satu kelompok di Kuadran 4. Sedang Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua; masuk dalam satu kelompok di Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

b) PDRB Tanpa Migas

PDRB Tanpa Migas sebagai salah satu indikator ekonomi untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 2000, 2002 dan 2004 atas dasar harga konstan 2000, menunjukkan

perkembangan yang cukup tinggi. Total PDRB Tanpa Migas seluruh provinsi di Indonesia yang pada tahun 2000 hanya sebesar Rp 1.218,33 triliun, pada tahun 2002 menjadi Rp 1.345,81 triliun; serta pada tahun 2004 telah meningkat menjadi Rp 1.511,76 triliun. Bila dilihat dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 2000 ke 2004 relatif mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp 59,40 triliun menjadi Rp 72,05 triliun. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyimpangan terhadap reratanya semakin meningkat. Secara umum rerata PDRB Tanpa Migas provinsi di Indonesia juga mengalami peningkatan dari Rp 39,72 triliun (2000) menjadi Rp 43,35 triliun (2002), serta menjadi Rp 48,09 triliun (2004).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar Total PDRB pada tahun 2004, dapat dilihat bahwa 4 (empat) provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar Rp 278,16 triliun; (ii) Jawa Timur, sebesar Rp 241,56 triliun; (iii) Jawa Barat, sebesar Rp 213,75 triliun; dan (iv) Jawa Tengah, sebesar Rp 127,21 triliun. Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp 82,68 triliun (untuk Total PDRB diduduki oleh Provinsi Riau). Hal ini menjadi pertanda bahwa peran sektor Migas di Provinsi Riau sangat berpengaruh bagi perekonomian wilayah. Untuk peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) Bangka Belitung, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) Bengkulu, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) Maluku, sebesar Rp 3,09 triliun; (iv) Maluku Utara, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) Gorontalo, sebesar Rp 1,89 triliun.

2) Status Perkembangan PDRB Tanpa Migas

Status perkembangan PDRB Tanpa Migas pada tahun 2004 yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii) Kuadran 3: Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi;

dapat dilihat bahwa hanya Provinsi Riau saja yang termasuk dalam kelompok di Kuadran 4. Sedang Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua; masuk dalam satu kelompok di Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Indikator Gabungan

Implementasi indikator gabungan yang akan dibahas pada bagian ini, secara umum akan dibagi dalam 2 bagian, yaitu indikator gabungan yang berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator gabungan yang berupa Indeks Pembangunan Daerah (IPD).

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM sebagai salah satu indikator gabungan untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 1999, 2002 dan 2005, menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi. Nilai IPM di Indonesia yang pada tahun 1999 sebesar 64,30, pada tahun 2002 menjadi 65,80; serta pada tahun 2005 telah meningkat menjadi 68,70. Bila dilihat dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 1999 ke 2005 relatif mengalami penurunan, yaitu dari sekitar 3,58 menjadi 3,48. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyimpangan terhadap reratanya semakin menurun. Secara umum rerata IPM di Indonesia juga mengalami peningkatan dari 64,40 (1999) menjadi 66,15 (2002), serta menjadi 68,36 (2005).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar nilai IPM pada tahun 2005, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 75.80; (ii) Sulawesi Utara, sebesar 73.40; (iii) DI Yogyakarta, sebesar 72.90; (iv) Riau, sebesar 72.20; dan (v) Kalimantan Timur, sebesar 72.20. Untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPM terkecil adalah: (i) Sulawesi Barat, sebesar 64.40; (ii) Irian Jaya Barat, sebesar 63.70; (iii) Nusa Tenggara Timur, sebesar

62.70; (iv) Papua, sebesar 60.90; dan (v) Nusa Tenggara Barat, sebesar 60.60.

2) Status Perkembangan IPM

Status perkembangan IPM pada tahun 2004 yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii) Kuadran 3: Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Jawa Barat; termasuk dalam satu kelompok di Kuadran 4. Sedang Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua; masuk dalam satu kelompok di Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

b. Indeks Pembangunan Daerah (IPD)

IPD sebagai salah satu indikator gabungan untuk data provinsi di Indonesia selama tahun 1994, 1996 dan 1998, menunjukkan perkembangan yang cukup bervariasi. Nilai IPD di Indonesia yang pada tahun 1994 sebesar 4,5678 pada tahun 1996 menjadi sebesar 4,7316; pada tahun 1998 turun menjadi 4,6149. Bila dilihat dari besaran Standar Deviasi (SD) dari kurun waktu 1994 ke 1998 relatif mengalami penurunan, yaitu dari sekitar 0,5988 menjadi 0,5131. Hal ini menandakan bahwa tingkat penyimpangan terhadap reratanya semakin menurun, walaupun pada tahun 1996 justru meningkat (sebesar 0,6328). Secara umum rerata IPD di Indonesia juga bervariasi dari sebesar 4,5678 (1994) menjadi 4,7316 (1996), serta menjadi 4,6149 (1998).

1) Peringkat Terbesar dan Terkecil

Jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesar nilai IPD pada tahun 1998, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 6.2800; (ii) Bali, sebesar 5.7618; (iii) DI Yogyakarta, sebesar 5.5018; (iv) Bengkulu, sebesar 4.7831; dan (v) Sulawesi Tenggara, sebesar 4.7640. Untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPD terkecil

adalah: (i) Jambi, sebesar 4.1975; (ii) Maluku, sebesar 4.1761; (iii) Jawa Barat, sebesar 4.1376; (iii) Nusa Tenggara Timur, sebesar 4.1260, dan (v) Papua, sebesar 4.0951.

2) Status Perkembangan IPD

Status perkembangan IPD pada tahun 1998 yang dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu: (i) Kuadran 1: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah; (ii) Kuadran 2: Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah; (iii) Kuadran 3: Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi; dan (iv) Kuadran 4: Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi; dapat dilihat bahwa Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara; termasuk dalam satu kelompok di Kuadran 4. Sedang Riau, Jambi, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua; masuk dalam satu kelompok di Kuadran 1. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan di atas, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- a. Banyak definisi/pengertian mengenai konsep pembangunan. Dalam perkembangannya, muncul variasi mengenai makna dan konsep-konsep pembangunan yang disertai dengan berbagai macam indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan/kemajuannya. Pengertian pembangunan dapat berbeda dari kultur atau negara yang satu dengan kultur atau negara yang lain (*culture specific*), dari situasi yang satu ke situasi yang lain (*situation specific*), dan dari periode yang satu ke periode yang lain (*time-specific*). Secara umum rentangan perbedaan mengenai konsep dan makna pembangunan antara lain menyangkut pokok permasalahan-permasalahan: (i) Hakekat nilai pembangunan yang harus dicapai; (ii) Perbedaan persepsi tentang hakekat proses pembangunan itu sendiri; (iii) Perbedaan pendapat mengenai penahapan dan jalur pembangunan; (iv) Perbedaan persepsi tentang hubungan antar bangsa di dalam proses pembangunan; (v) Perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia

dengan lingkungan hidupnya; (vi) Perbedaan pandangan tentang pemilikan faktor produksi; dan (vii) Perbedaan dalam strategi pembangunan.

- b. Strategi/model pembangunan yang ditempuh oleh berbagai negara, khususnya oleh Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam melaksanakan program-program pembangunan secara umum dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (i) Model Pembangunan Berorientasi pada Pertumbuhan; (ii) Model Pembangunan Berorientasi pada Kebutuhan Dasar atau Kesejahteraan; dan (iii) Model Pembangunan Berorientasi pada Manusia.
- c. Implementasi atas konsep pembangunan dengan berbagai macam indikator kemajuan pembangunan yang selama ini dipakai masih dominan pada aspek-aspek yang terkait dengan masalah ekonomi, seperti ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan sebagainya. Sementara indikator yang bersifat non-ekonomi, seperti indikator sosial dan fisik prasarana serta indikator yang sifatnya gabungan belum banyak dijadikan pengkajian dan *based-data* secara baik.
- d. Indikator ekonomi yang menjadi ukuran untuk melihat prestasi atau hasil-hasil pembangunan daerah yang berupa: (i) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Total (dengan Migas dan Non-Migas), dan (ii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas; jika dikaitkan dengan besaran yang ada pada masing-masing daerah menjadi menarik. Beberapa yang dipandang menarik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk PDRB Total (dengan Migas dan Non-Migas) harga konstan 2000 pada tahun 2004, jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesarnya, 4 (empat) provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar Rp 279,15 triliun; (ii) Jawa Timur, sebesar Rp 242,17 triliun; (iii) Jawa Barat, sebesar Rp 232,18 triliun; dan (iv) Jawa Tengah, sebesar Rp 135,79 triliun. Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, yaitu: Provinsi Riau, sebesar Rp 104,66 triliun. Sedang untuk peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) Bangka Belitung, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) Bengkulu, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) Maluku, sebesar Rp 3,10 triliun; (iv) Maluku Utara, sebesar Rp 2,13 triliun; dan

(v) Gorontalo, sebesar Rp 1,89 triliun. Sementara itu, dengan memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari Total PDRB di Indonesia, provinsi yang mempunyai kategori Nilai Rerata Terhadap Nasional Dan Laju Pertumbuhan Kategori Tinggi pada tahun 2004, adalah; (i) Sumatera Utara; (ii) DKI Jakarta; (iii) Jawa Tengah; (iv) Jawa Timur; dan (v) Banten.

2) Untuk PDRB Tanpa Migas harga konstan 2000 pada tahun 2004, jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesarnya 4 (empat) provinsi di antaranya berada di Pulau Jawa, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar Rp 278,16 triliun; (ii) Jawa Timur, sebesar Rp 241,56 triliun; (iii) Jawa Barat, sebesar Rp 213,75 triliun; dan (iv) Jawa Tengah, sebesar Rp 127,21 triliun. Sedang untuk peringkat kelima berada di luar Pulau Jawa, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp 82,68 triliun (untuk Total PDRB diduduki oleh Provinsi Riau). Hal ini menjadi pertanda bahwa peran sektor Migas di Provinsi Riau sangat berpengaruh bagi perekonomian wilayah. Sementara itu, untuk peringkat 5 (lima) terkecil adalah: (i) Bangka Belitung, sebesar Rp 7,01 triliun; (ii) Bengkulu, sebesar Rp 5,89 triliun; (iii) Maluku, sebesar Rp 3,09 triliun; (iv) Maluku Utara, sebesar Rp 2,13 triliun; dan (v) Gorontalo, sebesar Rp 1,89 triliun. Di lain pihak, dengan memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari PDRB Tanpa Migas, provinsi yang mempunyai kategori Nilai Rerata Terhadap Nasi-Onal Dan Laju Pertumbuhan Kategori Tinggi pada tahun 2004, adalah Provinsi Riau.

e. Indikator gabungan yang menjadi ukuran untuk melihat prestasi atau hasil-hasil pembangunan daerah berupa: (i) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (ii) Indeks Pembangunan Daerah (IPD); jika dikaitkan dengan besaran yang ada pada masing-masing daerah menjadi menarik. Beberapa yang dipandang menarik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Untuk IPM pada tahun 2005, jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesarnya, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 75.80; (ii) Sulawesi Utara, sebesar 73.40; (iii) DI Yogyakarta, sebesar 72.90; (iv) Riau, sebesar 72.20; dan (v) Kalimantan Timur, sebesar 72.20. Sedang untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai

IPM terkecil adalah: (i) Sulawesi Barat, sebesar 64.40; (ii) Irian Jaya Barat, sebesar 63.70; (iii) Nusa Tenggara Timur, sebesar 62.70; (iv) Papua, sebesar 60.90; dan (v) Nusa Tenggara Barat, sebesar 60.60. Sementara dengan memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari IPM, provinsi yang mempunyai kategori Nilai Rerata terhadap Nasional dan Laju Pertumbuhan Kategori Tinggi, adalah: (i) Sumatera Barat; (ii) Riau; (iii) Jambi; (iv) Sumatera Selatan; (v) Bengkulu; (vi) Bangka Belitung; dan (vii) Jawa Barat.

- 2) Untuk IPD pada tahun 1998, jika dilihat dari peringkat 5 (lima) terbesarnya, yaitu: (i) DKI Jakarta, sebesar 6.2800; (ii) Bali, sebesar 5.7618; (iii) DI Yogyakarta, sebesar 5.5018; (iv) Bengkulu, sebesar 4.7831; dan (v) Sulawesi Tenggara, sebesar 4.7640. Sedang untuk peringkat 5 (lima) dengan nilai IPD terkecil adalah: (i) Jambi, sebesar 4.1975; (ii) Maluku, sebesar 4.1761; (iii) Jawa Barat, sebesar 4.1376; (iii) Nusa Tenggara Timur, sebesar 4.1260, dan (v) Papua, sebesar 4.0951. Sementara dengan memadukan antara nilai rerata dan laju pertumbuhan dari IPD, provinsi yang mempunyai kategori Nilai Rerata terhadap Nasional dan Laju Pertumbuhan Kategori Tinggi, adalah: (i) Sulawesi Utara; (ii) Sulawesi Selatan; Dan (iii) Sulawesi Tenggara.

Saran dan Implementasi Kebijakan

Saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan, berdasar pada hasil pengkajian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Indikator yang bersifat non-ekonomi pada era-era sekarang ini, apalagi untuk mengukur kemajuan suatu daerah sangat mendesak untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2008, yang dalam bagian lampiran menyebutkan mengenai Aspek, Fokus, dan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Secara umum ada 3 (tiga) aspek yang menjadi pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di

Indonesia, yaitu: (i) **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**, yang terdiri dari: Indikator Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Indikator Kesejahteraan Sosial, dan Indikator Seni Budaya dan Olah Raga; (ii) **Aspek Pelayanan Umum**, yang terdiri dari Indikator Pelayanan Dasar, dan Indikator Pelayanan Penunjang; serta (iii) **Aspek Daya Saing Daerah**, yang terdiri dari: Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah, Indikator Fasilitas Wilayah / Infrastruktur, Indikator Iklim Berinvestasi, dan Indikator Sumber Daya Manusia.

- b. Indikator hasil-hasil pembangunan daerah yang berupa PDRB, baik total maupun tanpa migas, bila dilihat dari besaran nilainya sebagian besar juga masih berada di Pulau Jawa. Kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dengan meredistribusi kegiatan pembangunan di luar Pulau Jawa harus menjadi agenda pemerintah pada masa-masa mendatang. Hal ini terkait dengan masalah penduduk dan tingkat kepadatannya, yang disebagaian besar di Pulau Jawa sudah melebihi ambang batas untuk ukuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang besarnya sekitar 10.000 penduduk / km².
- c. Jika dilihat besaran dari indikator pembangunan daerah yang berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan (ii) Indeks Pembangunan Daerah (IPD), menunjukkan bahwa peringkat terkecil sebagian besar masih berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Oleh karenanya berbagai upaya dalam meningkatkan mutu modal manusai dan juga mutu penyelenggaraan pemerintahan harus merupakan bagian dari tantangan yang harus dipikirkan dan diselesaikan oleh para pemimpin di masa-masa mendatang baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mappadjantji Amien. (2005). *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Achmad Rochjadi. (2005). "Prospek dan Tantangan Otonomi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan APBD dan Pembangunan Daerah". *Makalah* disampaikan pada kegiatan Workshop Nasional Prospek dan Peluang Obligasi Daerah bagi Keberhasilan Pembangunan Daerah, yang diadakan oleh Depkeu RI bekerja sama dengan PT Mitra Gemilang di Garden Palace Hotel Surabaya, 6-7 Juli.
- Ahmad Erani Yustika. (2006). *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia Publisng.
- Arief Budiman. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Cetakan Keempat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik. (Berapa Terbitan). *Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004*. Jakarta: BPS.
- _____, BAPPENAS dan UNDP. (2004). *National Human Development Report 2004: The Economics of Democracy, Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS, BAPPENAS dan UNDP.
- Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab. Klaten. (2004). *Review Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Klaten Tahun 2001-2005*. Klaten: BAPEDA.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2001) "Indeks Pembangunan Daerah (*Regional Development Index*)". Draft/Rancangan dalam Bentuk Ringkasan yang Diterbitkan oleh Bappenas di Jakarta, pada 29 Oktober.
- Blakely, Edwar. (1994). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. London: Sage Publication.
- Dirjen Otda Depdagri dan Bappenas. (2002). *Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Mendukung Desentralisasi*. Jakarta: Dirjen Otda Depdagri dan Bappenas.
- Dirjen PKPD Depkeu RI. (2004.a). *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Dirjen PKPD.
- _____. (2004.b). *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003*. Jakarta: Dirjen PKPD.

- Gunawan Sumodiningrat. (2007). *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hera Susanti, Moh. Ikhsan M. dan Widyanti. (1995). *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Jakarta: LP FE-UI dan LPEM FE-UI.
- Hg. Suseno Triyanto Widodo. (1990). *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Irawan Kadiman. (2001). *Konsep dan Indikator Pembangunan*. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat IV. Jakarta: Penerbit LAN RI.
- Ji-Hyang Jang. (2002). *The Role of Institutional Accountability in Economics Development*. Texas: The University of Texas.
- Kahlil Rowter. (1996). "Indikator-Indikator Sosial Ekonomi". Bahan-bahan yang disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan di LPEM FE-UI Jakarta.
- Kasper, Wolfgang and Manfred E. Streit. (1998). *Institutional Economics: Social Order and Public Policy*. Northampton: Edward Elgar.
- Lambang Triyono. (2007). *Pembangunan sebagai Perdamaian*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Lembaga Padii dan Yayasan Obor Indonesia.
- Lincoln Arsyad. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPF.
- LPEM FE-UI. (2003). "Teknik dan Metode-Metode Analisis Daerah". Bahan-bahan untuk *Pendidikan dan Latihan Jenjang Jabatan Fungsional* (Mata Kuliah Pendidikan dan Latihan *Regional and Local Analysis*).
- Moeljarto. (1995). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Morris David Marris. (1979). *Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index*. USA: Pergamon Press.
- Mudrajad Kuncoro. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- _____. (2004). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Nafziger, E. Wayne. (2006). *Economics Development*, Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2007). **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008**. Jakarta: Penerbit CV Eko Jaya.
- Sadono Sukirno. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sri-Edi Swasono. (2008a). *Ekspos Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*, Edisi Baru 2008, Cetakan Keenam. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila - UGM.
- _____. (2008b). "Meninggalkan Ortodoksi dalam Pengajaran Ilmu Ekonomi", **Orasi Ilmiah**, Disampaikan dalam acara Seminar Nasional Memperingati Dies Natalis XXXII, di Aula Gedung IV Fakultas Ekonomi UNS, 14 April.
- Suyudi Mangunwihardjo. (2008). "Proses Politik dan Kegiatan Ekonomi" *Supplement* Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan Program Doktor Ilmu Ekonomi UNDIP Semarang.
- Tulus Tambunan. (2006). *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Pasca Krisis*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Pustaka Quantum.
- Todaro, Michael P. (2000). *Economic Development*, Seventh Edition. New York: Wesley Longman, Inc.
- UNDP. (2006). *Human Development Report 2006 (Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis)*. New York: Palgrave Macmillan Ltd.

LAMPIRAN

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik 3 (Tiga) Strategi Pembangunan

Karakteristik	Strategi Pembangunan		
	Pertumbuhan	Kebutuhan Dasar	Berorientasi Manusia
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Fokus	Industri	Pelayanan	Manusia
2. Nilai	Berpusat pada Industri	Berkiblat pada Manusia	Berpusat pada Manusia
3. Indikator	Ekonomi – Makro	Indikator Sosial	Hubungan Manusia dgn Sumber Daya
4. Peranan Pemerintah	<i>Entrepreneur</i>	<i>Service Provider</i>	<i>Enable / Facilitator</i>
5. Sumber Utama	Modal	Kemampuan Administratif dan Anggaran	Kreatifitas dan Komitmen
6. Kendala	Konsentrasi dan Marginalisasi	Keterbatasan Anggaran dan Inkompeten Aparat	Struktur dan Prosedur yang tidak Mendukung

Sumber: Moeljarto. (1995). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, halaman 26 [Matriks 2.1].

Tabel 2. Matrik Status Perkembangan PDRB [Non Migas dan Migas] Harga Konstan 2000, Berdasarkan Provinsi di Indonesia, Tahun 2004

Daya Tumbuh						
\bar{R}	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(03) Sumatera Barat; (05) Jambi; (07) Bengkulu; (08) Lampung; (12) Jawa Barat; (18) Nusa Tenggara Barat; (19) Nusa Tenggara Timur; (25) Sulawesi Tengah; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Tenggara; dan (28) Gorontalo.</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi	(03) Sumatera Barat; (05) Jambi; (07) Bengkulu; (08) Lampung; (12) Jawa Barat; (18) Nusa Tenggara Barat; (19) Nusa Tenggara Timur; (25) Sulawesi Tengah; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Tenggara; dan (28) Gorontalo.	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(02) Sumatera Utara; (11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur; dan (16) Banten.</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi	(02) Sumatera Utara; (11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur; dan (16) Banten.
	Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi					
	(03) Sumatera Barat; (05) Jambi; (07) Bengkulu; (08) Lampung; (12) Jawa Barat; (18) Nusa Tenggara Barat; (19) Nusa Tenggara Timur; (25) Sulawesi Tengah; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Tenggara; dan (28) Gorontalo.					
	Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi					
(02) Sumatera Utara; (11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur; dan (16) Banten.						
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (06) Sumatera Selatan; (09) Bangka Belitung; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (20) Kalimantan Barat; (21) Kalimantan Tengah; (22) Kalimantan Selatan; (24) Sulawesi Utara; (30) Maluku; (31) Maluku Utara; dan (32) Papua.</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah	(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (06) Sumatera Selatan; (09) Bangka Belitung; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (20) Kalimantan Barat; (21) Kalimantan Tengah; (22) Kalimantan Selatan; (24) Sulawesi Utara; (30) Maluku; (31) Maluku Utara; dan (32) Papua.	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(04) Riau; dan (23) Kalimantan Timur.</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah	(04) Riau; dan (23) Kalimantan Timur.	
Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah						
(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (06) Sumatera Selatan; (09) Bangka Belitung; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (20) Kalimantan Barat; (21) Kalimantan Tengah; (22) Kalimantan Selatan; (24) Sulawesi Utara; (30) Maluku; (31) Maluku Utara; dan (32) Papua.						
Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah						
(04) Riau; dan (23) Kalimantan Timur.						
\bar{X}						
Nilai thd Rerata Nas.						

Sumber: Diolah dari BPS. (berapa terbitan). *Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004* (Tabel 93, Tabel 95 dan Tabel 97).

Tabel 3. Matrik Status Perkembangan PDRB [Tanpa Migas] Harga Konstan 2000, Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2004

Daya Tumbuh		
\bar{R}	<p style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi</p> <p>(05) Jambi; (23) Kalimantan Timur; (25) Sulawesi Tengah; (27) Sulawesi Tenggara; dan (28) Gorontalo.</p>	<p style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi</p> <p>(04) Riau</p>
	<p style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah</p> <p>(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (03) Sumatera Barat; (06) Sumatera Selatan; (07) Bengkulu; (08) Lampung; (09) Bangka Belitung; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (18) Nusa Tenggara Barat; (19) Nusa Tenggara Timur; (20) Kalimantan Barat; (21) Kalimantan Tengah; (22) Kalimantan Selatan; (24) Sulawesi Utara; (26) Sulawesi Selatan; (30) Maluku; (31) Maluku Utara; dan (32) Papua.</p>	<p style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah</p> <p>(02) Sumatera Utara; (11) DKI Jakarta; (12) Jawa Barat; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur; dan (16) Banten.</p>
\bar{X}		Nilai thd Rerata Nas.

Sumber: Diolah dari BPS. (berapa terbitan). *Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2000-2003 dan Tahun 2001-2004* (Tabel 98, Tabel 100 dan Tabel 102).

Tabel 4. Matrik Status Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2005

Daya Tumbuh						
\bar{R}	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">(18) Nusa Tenggara Barat; dan (25) Sulawesi Tengah.</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi	(18) Nusa Tenggara Barat; dan (25) Sulawesi Tengah.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">(03) Sumatera Barat; (04) Riau; (05) Jambi; (06) Sumatera Selatan; (07) Bengkulu; (09) Bangka Belitung; dan (12) Jawa Barat.</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi	(03) Sumatera Barat; (04) Riau; (05) Jambi; (06) Sumatera Selatan; (07) Bengkulu; (09) Bangka Belitung; dan (12) Jawa Barat.
	Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi					
(18) Nusa Tenggara Barat; dan (25) Sulawesi Tengah.						
Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi						
(03) Sumatera Barat; (04) Riau; (05) Jambi; (06) Sumatera Selatan; (07) Bengkulu; (09) Bangka Belitung; dan (12) Jawa Barat.						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">(15) Jawa Timur; (16) Banten; (19) Nusa Tenggara Timur; (20) Kalimantan Barat; (22) Kalimantan Selatan; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Tenggara; (28) Gorontalo; (31) Maluku Utara; dan (32) Papua.</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah	(15) Jawa Timur; (16) Banten; (19) Nusa Tenggara Timur; (20) Kalimantan Barat; (22) Kalimantan Selatan; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Tenggara; (28) Gorontalo; (31) Maluku Utara; dan (32) Papua.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">(02) Sumatera Utara; (08) Lampung; (11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (21) Kalimantan Tengah; (23) Kalimantan Timur; (24) Sulawesi Utara; dan (30) Maluku.</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah	(02) Sumatera Utara; (08) Lampung; (11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (21) Kalimantan Tengah; (23) Kalimantan Timur; (24) Sulawesi Utara; dan (30) Maluku.	
Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah						
(15) Jawa Timur; (16) Banten; (19) Nusa Tenggara Timur; (20) Kalimantan Barat; (22) Kalimantan Selatan; (26) Sulawesi Selatan; (27) Sulawesi Tenggara; (28) Gorontalo; (31) Maluku Utara; dan (32) Papua.						
Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah						
(02) Sumatera Utara; (08) Lampung; (11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (21) Kalimantan Tengah; (23) Kalimantan Timur; (24) Sulawesi Utara; dan (30) Maluku.						
\bar{X}						
Nilai thd Rerata Nas.						

Sumber: - Diolah dari BPS, BAPPENAS dan UNDP (2004). *National Human Development Report 2004: The Economics of Democracy, Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: BPS, BAPPENAS dan UNDP.

- Diolah dari Kantor Menko Kesra. (2006). Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia 2006.

Tabel 5. Matrik Status Perkembangan Indeks Pembangunan Daerah (IPD), Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 1998

Daya Tumbuh		
\bar{R}	<p style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional Rendah, Daya Tumbuh Tinggi</p> <p>(01) Nanggroe Aceh Darussalam; (02) Sumatera Utara; (06) Sumatera Selatan; (08) Lampung; (11) DKI Jakarta; (13) Jawa Tengah; (15) Jawa Timur; (18) Nusa Tenggara Barat; (20) Kalimantan Barat; (21) Kalimantan Tengah; dan (25) Sulawesi Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Tinggi</p> <p>(24) Sulawesi Utara; (26) Sulawesi Selatan; dan (27) Sulawesi Tenggara.</p>
	<p style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional dan Daya Tumbuh Rendah</p> <p>(04) Riau; (05) Jambi; (12) Jawa Barat; (19) Nusa Tenggara Timur; (30) Maluku; dan (32) Papua.</p>	<p style="text-align: center;">Nilai thd Rerata Nasional Tinggi, Daya Tumbuh Rendah</p> <p>(03) Sumatera Barat; (07) Bengkulu; (14) DI Yogyakarta; (17) Bali; (22) Kalimantan Selatan; dan (23) Kalimantan Timur.</p>
\bar{X} Nilai thd Rerata Nas.		

Sumber: Diolah dari BAPPENAS. (2001) “Indeks Pembangunan Daerah (*Regional Development Index*)”. Draft/Rancangan dalam bentuk Ringkasan yang diterbitkan oleh Bappenas Jakarta, pada 29 Oktober (Tabel 1).